

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI *GOOD GOVERNANCE* DALAM
PENGELOLAAN KEUANGAN MASJID
AR-RAHMAN LAPPA-LAPPAE
KECAMATAN SUPPA**



OLEH:

**NURLIAH
NIM : 2120203862202046**

PAREPARE

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

**IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE DALAM
PENGELOLAAN KEUANGAN MASJID
AR-RAHMAN LAPPALAPPAAE
KECAMATAN SUPPA**



OLEH:

**NURLIAH
NIM : 2120203862202046**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun) pada Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi

: Implementasi *Good governance* dalam Pengelolaan Keuangan Masjid Ar - Rahman Lappa-Lappae Kecamatan Suppa

Nama Mahasiswa

: Nurliah

Nomor Induk Mahasiswa

: 2120203862202046

Program Studi

: Akuntansi Syariah

Fakultas

: Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing

: Surat Penetapan Pembimbing Skripsi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Nomor: B.2466/In.39/FEBI.04/PP.00.9/06/2024

Disetujui Oleh:

Pembimbing

: Indrayani, M.Ak.

NIP

: 198812252019032009

PAREPARE

Mengetahui:



Prof. Dr. Muzamilah Muhammadun, M.A.
NIP. 197102082001122002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Implementasi *Good governance* dalam Pengelolaan Keuangan Masjid Ar - Rahman Lappa-Lappa Kecamatan Suppa

Nama Mahasiswa : Nurliah

Nomor Induk Mahasiswa : 2120203862202046

Program Studi : Akuntansi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Nomor: B.2466/In.39/FEBI.04/PP.00.9/06/2024

Tanggal Kelulusan : 11 Juni 2025

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Indrayani, M.Ak

(Ketua)

Prof. Dr. Hannani, M.Ag

(Anggota)

Ikhsan Gasali, M.Si,

(Anggota)



PAREPARE

Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Prof. Dr. Muzaffar Muhamadun, M.Ag
NIP. 19710208/001122002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

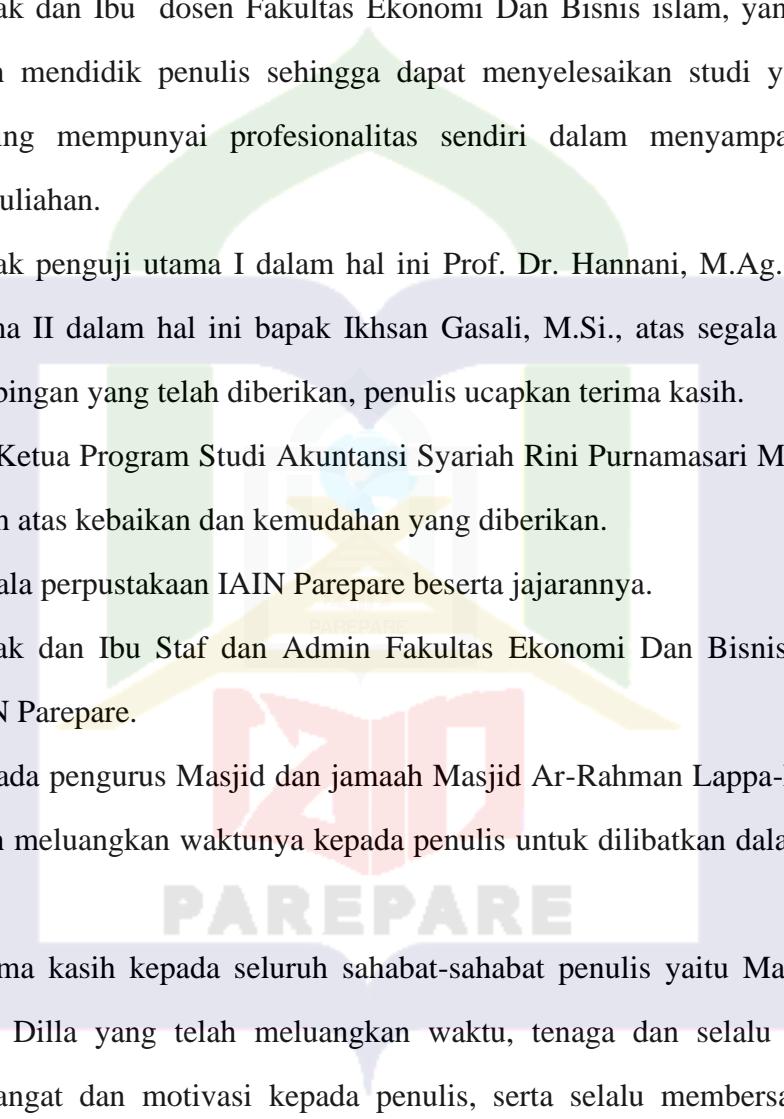
Alhamdulillah, Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan meraih gelar Sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Sebagai ungkapan rasa syukur dan kebahagiaan yang mendalam, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta atas segala dukungan dan doa yang tak terhingga, kepada Ibunda Iwali dan ayah Palman mamma, yang senantiasa memberikan semangat, nasihat dan doa, kasih sayang, dan dukungan tanpa henti. Segala pengorbanan dan ketulusan mereka menjadi sumber kekuatan dan motivasi terbesar bagi penulis. Tugas akhir ini penulis persembahkan dengan sepenuh hati sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih yang mendalam kepada beliau berdua. Terimakasih juga penulis ucapkan kepada kakak - kakak saya atas dukungan yang telah diberikan kepada penulis.

Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ibu Indrayani, M.Ak selaku dosen pembimbing, atas segala bimbingan, arahan, dan dukungan yang telah diberikan selama proses penyusunan tugas akhir ini.

Selanjutnya penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Rektor IAIN Parepare, Prof. Dr. Hannani, M.Ag. dan para wakil Rektor yang telah memimpin kampus IAIN Parepare tempat menimba ilmu pengetahuan.

- 
2. Ibu Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswanya.
 3. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, yang selama ini telah mendidik penulis sehingga dapat menyelesaikan studi yang masing-masing mempunyai profesionalitas sendiri dalam menyampaikan materi perkuliahan.
 4. Bapak penguji utama I dalam hal ini Prof. Dr. Hannani, M.Ag. dan penguji utama II dalam hal ini bapak Ikhsan Gasali, M.Si., atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.
 5. Ibu Ketua Program Studi Akuntansi Syariah Rini Purnamasari M.Ak., terima kasih atas kebaikan dan kemudahan yang diberikan.
 6. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya.
 7. Bapak dan Ibu Staf dan Admin Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam yang IAIN Parepare.
 8. Kepada pengurus Masjid dan jamaah Masjid Ar-Rahman Lappa-Lappae yang telah meluangkan waktunya kepada penulis untuk dilibatkan dalam penelitian ini.
 9. Terima kasih kepada seluruh sahabat-sahabat penulis yaitu Marsyah, Afika Dan Dilla yang telah meluangkan waktu, tenaga dan selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis, serta selalu bersamai penulis dalam perjalanan hidupnya.
 10. Sahabat penulis, Dwi Sunarti atas kesabaran dan ketulusannya yang selalu menjadi pendengar yang baik bagi penulis.

11. Teman-teman seperjuangan sekelas saya dari prodi Akuntansi Syariah serta teman-teman KKN, saya ucapkan terima kasih atas dukungan, kebersamaan dan semangat yang kalian berikan selama proses penyusunan skripsi ini.
12. Dan yang paling penting, terima kasih kepada diri sendiri yang telah berjuang keras, tidak menyerah, dan tetap teguh pada impian. Walaupun banyak rintangan dan tantangan yang dilalui, kamu tetap kuat dan berani menghadapi semuanya. Kamu telah membuktikan bahwa kamu mampu melewati kesulitan dan mencapai tujuan. Bangga sekali dengan dirimu sendiri!

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, baik berupa dukungan moril maupun materil, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat berbagai kekurangan dan kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, kritik serta saran yang bersifat konstruktif sangat penulis harapkan guna perbaikan dan pengembangan penelitian ke depannya agar dapat menghasilkan karya yang lebih baik. Pada akhirnya, penulis berharap agar hasil tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Aamiin.

Pinrang, 1 Mei 2025

2 Syawal 1446 H

Penulis



Nurliah

Nim: 2120203862202046

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurliah
NIM : 2120203862202046
Tempat/Tanggal Lahir : Majakka, 26 Januari 2004
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Implementasi *Good governance* dalam Pengelolaan Keuangan Masjid Ar - Rahman Lappa-Lappae Kecamatan Suppa

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Pinrang, 1 April 2025

2 Syawal 1446 H

Penulis,

Nurliah
NIM:2120203862202046

ABSTRAK

NURLIAH (2120203862202046) “*Implementasi Good governance Dalam Pengelolaan Keuangan Masjid Ar - Rahman Lappa-Lappae Kecamatan Suppa, (Dibimbing oleh Ibu Indrayani.)*”

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi prinsip-prinsip *good governance* yang diterapkan dalam pengelolaan keuangan di Masjid Ar Rahman Lappa-Lappae, serta apa yang menjadi kendala pada penerapannya dan apa yang perlu dioptimalkan. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan rekomendasi yang bermanfaat bagi peningkatan tata kelola keuangan masjid, yang pada akhirnya dapat memperkuat fungsi masjid sebagai lembaga yang mampu mengelola dana masyarakat secara profesional dan amanah

Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan jenis penelitian pendekatan lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi. Data dianalisis melalui tahapan *editing, classifying, verifying, dan concluding*.

Hasil temuan menunjukkan bahwa pada Masjid Ar-Rahman Lappa-Lappae telah mengimplementasikan *good governance* seperti transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Dalam aspek transparansi, pengumuman jumlah saldo kas masuk dan keluar yang diumumkan setiap hari jumat, merupakan salah satu upaya untuk bersikap terbuka kepada jamaah. Namun, untuk meningkatkan transparansi, informasi yang disampaikan sebaiknya mencakup rincian transaksi dan disajikan dalam format laporan keuangan yang standar. Dalam aspek akuntabilitas, pencatatan transaksi keuangan menunjukkan adanya pertanggungjawaban. Namun, pencatatan yang masih sederhana dan belum sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, seperti PSAK 45, menunjukkan perlu adanya peningkatan dalam hal ini. Sedangkan dalam aspek partisipasi, keterlibatan masyarakat dalam kegiatan dan pengelolaan keuangan masjid menunjukkan adanya partisipasi aktif. Adapun hal yang masih menjadi kendala pada Masjid Ar Rahman Lappa-Lappae, yakni terkait transparansi dan akuntabilitas yang belum optimal atau tidak sesuai dengan standar akuntansi pada organisasi nirlaba, kemudian pemahaman SDM yang kurang, terkait tata kelola yang baik pada organisasi nirlaba.

Kata Kunci: *Good governance* , Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi, akuntansi Syariah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xiiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan Penelitian Relevan	11
B. Tinjauan Teoritis	19
C. Tinjauan Konseptual	38
D. Kerangka Pikir	41
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Jenis Penelitian.....	43
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian	44
C. Fokus Penelitian.....	44
D. Jenis Dan Sumber Data.....	44
E. Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Data	46
F. Uji Keabsahan Data	50
G. Teknik Analisis Data.....	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	53
A. Hasil Penelitian	53
B. Pembahasan.....	59
BAB V PENUTUP.....	69
A. KESIMPULAN	69
B. SARAN	71
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN.....	74

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Kerangka Pikir	42



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Pedoman Wawancara	76
2	SK Pembimbing Skripsi	78
3	Berita Acara Revisi Judul Skripsi	-
4	Surat Izin Penelitian Dari IAIN Parepare	79
5	Surat Izin Penelitian Dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	80
6	Surat Selesai Meneliti	81
7	Surat Keterangan Wawancara	82
8	Dokumentasi	87
9	Biodata Penulis	91

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
س	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ه	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ڙ	ڙal	ڙ	Zet (dengan titik di atas)
ڙ	Ra	R	Er
ڙ	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ẗ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ڙ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ˋain	ˊ	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ڪ	Kaf	K	Ka
ڦ	Lam	L	El
ڻ	Mim	M	Em
ڻ	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ءـ	Hamzah	‘	Apostrof
يـ	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monofong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـ	Fathah	A	A
ـ	Kasrah	I	I
ـ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وَ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُلِّيَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قال qāla
- رَمَى ramā
- قَيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبَرُّ al-birru

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu لـ, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلْمَنْ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَلْخُذُ *ta'khužu*
- شَيْءٌ *syai'un*
- النَّوْءُ *an-nau'u*
- إِنَّ *inna*

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/*
- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh

kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- **الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ** *Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn*
- **الرَّحْمٰنُ الرَّحِيمُ** *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah Swt. hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- **اللّٰهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ** *Allaāhu gafūrun rahīm*
- **لِلّٰهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا** *Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

A. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

<i>Swt.</i>	=	<i>subhānahu wata`ālā</i>
<i>saw.</i>	=	<i>Shallallahu `Alaihi wa Sallam'</i>
<i>a.s.</i>	=	<i>alaihis salam</i>
<i>H</i>	=	<i>Hijriah</i>
<i>M</i>	=	<i>Masehi</i>
<i>SM</i>	=	<i>Sebelum Masehi</i>

l. = *Lahir Tahun*

w. = *Wafat tahun*

QS.../...:4 = *QS. al-Baqarah/2:187atau QS Ibrahim/...,ayat4*

HR = *Hadis Riwayat*

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds, [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam Bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al, : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk, (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan untuk karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahannya.

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam Bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut ukuran kepemilikannya, organisasi terbagi menjadi dua jenis, yakni organisasi sektor privat atau swasta dan organisasi sektor publik. Organisasi sektor swasta ialah organisasi yang kepemilikannya dipegang oleh satu atau beberapa investor saja, sedangkan organisasi sektor publik adalah suatu organisasi yang dimiliki oleh masyarakat secara umum, dengan kata lain merupakan milik bersama.¹ Dengan demikian, organisasi swasta merupakan kebalikan dari organisasi sektor publik, yang cakupan dan kompleksitasnya lebih luas. Organisasi sektor publik biasanya merujuk kepada organisasi pemerintahan atau negara.

Lembaga sektor publik seringkali dianggap sebagai entitas yang kurang efisien dan tertinggal dalam mengikuti dinamika serta inovasi yang berkembang pada sektor swasta, Hal tersebut disebabkan karena kurangnya manajemen dalam organisasi. Hal ini terjadi, karena entitas dalam sektor publik berada di bawah kepemilikan publik dan dikelola untuk melayani masyarakat luas yang tidak didominasi oleh satu investor saja, sehingga dinamika dan perkembangan organisasi sangat bergantung pada kesadaran serta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan praktik akuntansinya. Hal ini juga berlaku pada organisasi peribadatan seperti masjid yang berperan penting dalam kehidupan masyarakat.² Jadi dapat diketahui, bahwa yang menjadi pembeda antara organisasi sektor swasta dan publik ialah cakupannya yang lebih luas, yang mana dikuasai oleh masyarakat umum. Dengan demikian,

¹ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: ANDI, 2009).

² dan Muhammad Syam Kusufi Abdul halim, *Akuntansi Sektor Publik Dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan, Dari Pemerintah Hingga Tempat Ibadah* (Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2012).

kemajuan dan perkembangan organisasi tersebut sangat bergantung pada tingkat kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi dan mendukung pengelolaan organisasi.

Masjid adalah institusi dalam sektor publik yang berperan sebagai organisasi nirlaba, menjalankan berbagai kegiatan keagamaan dan sosial tanpa tujuan komersial. Masjid memiliki peranan penting dalam kehidupan umat muslim, tidak hanya sebagai tempat ibadah, melainkan juga dalam membangun komunitas yang berlandaskan pada nilai-nilai sosial dan keagamaan.³ Semua kegiatan ini dijalankan demi kepentingan masyarakat tanpa mengharapkan imbalan dalam bentuk materi. dana yang masuk tidak dimaksudkan untuk menghasilkan laba, melainkan dikelola secara amanah untuk kepentingan operasional masjid dan pemberdayaan umat. Selain itu, pengurus masjid biasanya bekerja secara sukarela dan tidak memperoleh keuntungan pribadi. Jika terdapat surplus dana, maka dana tersebut akan digunakan kembali untuk kegiatan keagamaan atau perawatan masjid, bukan untuk dibagikan sebagai keuntungan. Karena sifat dan tujuannya yang tidak berorientasi pada profit serta lebih menekankan nilai sosial, keagamaan, dan pelayanan masyarakat, masjid dengan sendirinya termasuk dalam kategori organisasi nirlaba. Sebagai organisasi nirlaba, masjid umumnya menggunakan indikator tunggal sebagai ukuran keberhasilannya, seperti jumlah dana sumbangan yang diterima, pertumbuhan jumlah anggota, jumlah pengunjung, jumlah orang yang dilayani dan biaya overhead yang mampu untuk diminimalisasikannya.⁴

Walaupun tujuan utama organisasi keagamaan adalah untuk melayani umat, hal ini tidak berarti bahwa aspek keuangan dapat diabaikan. Sebaliknya, pengelolaan

³ Ratna Euis Subagya, “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Masjid Berdasarkan Prinsip Akuntansi Syariah (Studi Masjid Baitul Mu’minin Kab. Lampung Tengah),” 2023.

⁴ Indra Bastian, *Akuntansi Untuk LSM Dan Partai Politik* (Jakarta: ERLANGGA, 2007).

keuangan yang baik sangat penting untuk mendukung kelangsungan dan efektivitas pelayanan tersebut.. Tujuan keuangan ini bertujuan untuk menunjang pelaksanaan layanan ibadah yang memadai serta memenuhi standar yang sesuai dengan aturan dalam ajaran agama (syariah), serta menunjang tujuan lainnya seperti kegiatan sosial kemasyarakatan dan pendidikan.⁵ Seperti halnya organisasi atau lembaga publik lainnya, organisasi keagamaan turut menghadapi dorongan untuk meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaannya, Dengan mempertimbangkan aspek biaya ekonomi maupun sosial, serta meninjau dampak baik maupun buruk dari setiap aktivitas yang dijalankan, seharusnya berbagai tuntutan tersebut mendorong diterimanya akuntansi secara lebih luas sebagai disiplin ilmu yang esensial dalam pengelolaan urusan publik, termasuk dalam struktur kelembagaan organisasi berbasis keagamaan.

Keuangan lembaga keagamaan umumnya dihimpun dari kontribusi jamaah serta donasi dari pihak-pihak tertentu yang peduli terhadap kegiatan sosial dan spiritual secara sukarela. Karena sifatnya yang sukarela pendapatan ini sulit untuk diprediksi. Sumber dana utama berasal dari komunitas Muslim, yang mencakup infak, sedekah, zakat, fidyah, dan bentuk kontribusi lainnya sesuai prinsip-prinsip syariat Islam. Meskipun demikian, tidak tertutup kemungkinan bagi organisasi masjid untuk menerima bantuan dari pihak eksternal maupun memanfaatkan skema pinjaman. Akan tetapi, penggunaan pinjaman umumnya dihindari oleh pihak pengelola masjid, kecuali apabila terdapat penjamin secara pribadi yang bersedia bertanggung jawab. Dana ini dialokasikan tidak hanya untuk pemeliharaan bangunan dan fasilitas, tetapi juga untuk kegiatan rutin atau insidental, seperti pengajian, TPQ, bazar, dan peringatan hari besar Islam. Akuntabilitas organisasi keagamaan ditujukan

⁵ Wisnu, Untoro, *Kepublikan Sebagai Pemoderasi Pengaruh Perencanaan Strategik Pada Kinerja Organisasional* (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2010).

kepada seluruh umat yang telah memberikan kepercayaannya, sebagai bentuk tanggung jawab moral dan institusional. Pemenuhan aspek ini merupakan hal krusial dalam membangun kredibilitas pengelolaan. Ketidakmampuan dalam memenuhi kewajiban pertanggungjawaban berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan, kekecewaan di kalangan jamaah, bahkan dapat memicu munculnya prasangka negatif atau fitnah.⁶

Pada dasarnya, konsep pencatatan dalam Islam didasarkan pada ayat Al-Baqarah: 282 yang mendorong umat Islam untuk peduli terhadap pencatatan dan menciptakan tradisi pencatatan di kalangan umat. Pada masa kekhalifahan, terutama pada masa para khalifah seperti Abu Bakar Ash Shiddiq, Umar Bin Khattab, Ustman Bin Affan, dan Ali Bin Abi Thalib, akuntansi syariah berkembang pesat. Mereka menggunakan istilah "jaridah" untuk pencatatan keuangan. Konsep pencatatan ini kemudian berkembang dan berkaitan erat dengan prinsip-prinsip akuntansi konvensional seperti sistem entri ganda yang dikembangkan oleh Luca Pacioli pada abad ke-15. Akuntansi Islam tidak hanya berkaitan dengan pencatatan transaksi keuangan, tetapi juga mencerminkan semangat menciptakan lingkungan keuangan yang adil sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Akuntansi Islam bertujuan untuk mencapai kesejahteraan manusia dan keadilan sosial, dan memastikan bahwa setiap transaksi dan laporan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.⁷

Dalam agama, prinsip pencatatan bertujuan untuk menciptakan kejujuran, kepastian, keterbukaan, dan keadilan dalam hubungan antarmanusia, yang dalam akuntansi dikenal dengan sebutan akuntabilitas. Pada organisasi keagamaan, akuntabilitas ini bersifat *vertical* (kepada tuhan atau otoritas yang lebih tinggi) dan *horizontal* (kepada sesama manusia). Agama juga mengajarkan bahwa setiap tindakan akan dipertanggungjawabkan dihadapan tuhan.

⁶ Bastian, *Akuntansi Untuk LSM Dan Partai Politik*.

⁷ Saddan Husain, "Profit Accountability in Small and Medium Enterprises : An Islamic Accounting Perspective" 8, no. 1 (2025).

Konsep utama dalam akuntansi lembaga non-profit mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, serta pelaporan keuangan yang ssuai dengan standar yang berlaku untuk memastikan pengelolaan dana yang efisien dan bertanggung jawab.⁸ Laporan keuangan merupakan salah satu instrumen utama dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi. Khusus untuk masjid, panduan penyusunan laporan keuangan telah diatur dalam PSAK 45, yang dirancang untuk organisasi nirlaba. Beberapa masjid telah menerapkan kebiasaan penyusunan laporan pertanggungjawaban secara terstruktur dan sistematis. Namun demikian, pada umumnya pencatatan keuangan masjid masih dilakukan secara manual melalui buku kas mutasi atau metode pencatatan tunggal, yang belum sepenuhnya sesuai dengan standar laporan keuangan sebagaimana diatur dalam PSAK 45. Alasan pengurus menggunakan metode *single entry* karena sederhana dan mudah dipahami. Laporan keuangan masjid umumnya disusun dalam format dua kolom, yakni kolom penerimaan dan pengeluaran. Laporan tersebut mencatat secara rinci asal-usul sumber dana serta penggunaannya. Setiap minggu atau pada akhir bulan, total nilai kedua kolom tersebut dihitung dan dibandingkan untuk memperoleh selisih saldo. Dalam praktiknya, selisih positif lebih sering dijumpai, sementara selisih negatif jarang terjadi.⁹

Tanggung jawab pengelolaan keuangan masjid umumnya dipercayakan kepada bendahara sebagai pihak yang mengatur dan mencatat seluruh transaksi keuangan. Penyampaian laporan keuangan masjid umumnya dilakukan pada momen shalat

⁸ Rismala, Muslimin, Amin Asbi, *Akuntansi Sosial: Integrasi Etika Dan Keberlanjutan Yang Bertanggung Jawab*, ed. Kurnia Perdana (Malang: Pustaka Peradaban, 2025).

⁹ A dan Herawati Nurfaisyah, “Penyusunan Laporan Keuangan Pada Organisasi Keagamaan Berdasarkan ISAK No.35 (Studi Kasus Masjid Agung Jami Singaraja),” 2022.

Jumat sebagai sarana transparansi kepada jamaah.¹⁰ Pengurus masjid yang memiliki tanggung jawab tidak akan mengabaikan kewajibannya, terutama karena dana yang dikelola bersumber dari sedekah jamaah. Tanpa adanya pertanggungjawaban keuangan yang transparan dan terperinci, pengurus berisiko mengalami kerugian reputasi. Selain itu, citra masjid sebagai institusi keagamaan juga berpotensi mengalami dampak negatif. Oleh karena itu, akuntabilitas menjadi hal yang krusial dalam pengelolaan keuangan masjid agar prosesnya berlangsung secara transparan dan dapat memenuhi harapan donatur serta masyarakat sekitar.

Salah satu upaya untuk menjamin pengelolaan dana masjid yang efektif adalah dengan mengimplementasikan prinsip *good governance* dalam penyusunan laporan keuangan. Penerapan *good governance* pada laporan keuangan masjid berperan penting dalam meningkatkan kualitas laporan serta memastikan bahwa dana yang diterima dari masyarakat digunakan secara tepat dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Prinsip-prinsip tata kelola yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, menjadi landasan utama dalam proses ini. Penerapan prinsip-prinsip ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan memastikan dana dikelola dengan tepat. Dengan *good governance*, masjid dapat mengelola keuangan secara efisien, transparan, dan bertanggung jawab, serta memaksimalkan fungsi sosial dan ibadahnya.¹¹

Berdasarkan beberapa penelitian, banyak masjid yang belum menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan dana mereka. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya pemahaman tentang tata kelola yang baik,

¹⁰ Irwan Taufiq, Ritonga, *Akuntansi Pemerintahan Daerah* (Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM, 2010).

¹¹ Abdul, Halim, *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi Ke-3 (Jakarta: Salemba Empat, 2008).

keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, dan rendahnya transparansi serta akuntabilitas dalam pencatatan dan pelaporan keuangan. Akibatnya, potensi dana dari donasi masyarakat tidak dimanfaatkan secara maksimal, yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan masjid. Implementasi *Good Corporate Governance (GCG)* dalam laporan keuangan masjid memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta keberlanjutan pengelolaan dana masjid. Dengan penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, laporan keuangan masjid diharapkan mampu menyajikan informasi yang akurat dan relevan bagi para pemangku kepentingan, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana tersebut sehingga mendorong kesinambungan donasi.

Berdasarkan dari observasi yang telah dilakukan, diketahui bahwa prinsip-prinsip *good governance* di Masjid Ar-Rahman Lappa-Lappae telah diterapkan seperti Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi. Akuntabilitas di masjid Ar- Rahman tercermin dari adanya sistem pelaporan dan pertanggung jawaban yang dilakukan oleh pengurus masjid. Transparansi diwujudkan dengan keterbukaan informasi khususnya dalam bidang keuangan dan program kerja. Setiap transaksi yang dilakukan dicatat dan disampaikan kepada jamaah. Dan untuk partisipasi, masjid Ar- Rahman membuka ruang partisipasi bagi jamaah dalam berbagai kegiatan, pengurus melibatkan masyarakat dalam musyawarah seperti kegiatan pengajian, buka puasa bersama dan forum ketika ingin membahas program atau rencana yang ingin dilaksanakan. Jadi, di masjid Ar-Rahman telah diterapkan *good governance* akan tetapi belum dilakukan secara maksimal, transaksi yang dilakukan hanya dicatat sebagai pemasukan dan pengeluaran saja, tidak ada laporan keuangan yang dibuat untuk seluruh aktivitas keuangan masjid.

Oleh karena itu, Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi prinsip-prinsip *good governance* yang diterapkan dalam pengelolaan keuangan di Masjid Ar Rahman Lappa-Lappae, serta apa yang menjadi kendala pada penerapannya dan apa yang perlu dioptimalkan. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan rekomendasi yang bermanfaat bagi peningkatan tata kelola keuangan masjid, yang pada akhirnya dapat memperkuat fungsi masjid sebagai lembaga yang mampu mengelola dana masyarakat secara profesional dan amanah. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi signifikan terhadap kajian literatur mengenai penerapan *good governance* dalam sektor nirlaba, khususnya pada lembaga keagamaan seperti masjid. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi penting bagi pengelola masjid, pemangku kepentingan terkait, serta kalangan peneliti dan akademisi dalam memahami urgensi penerapan prinsip *good governance* pada laporan keuangan masjid.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, terdapat sejumlah permasalahan utama yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menjawab beberapa pertanyaan penelitian yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan prinsip *Good governance* pada pengelolaan keuangan Masjid Ar Rahman Lappa-Lappae Kecamatan Suppa?
2. Apa yang menjadi kendala penerapan *Good governance* pada pengelolaan keuangan Masjid Ar Rahman Lappa-Lappae Kecamatan Suppa?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikembangkan, penelitian ini memiliki tujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan *Good governance* pada pengelolaan keuangan Masjid Ar Rahman Lappa-Lappae Kecamatan Suppa.
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi kendala penerapan *Good governance* pada pengelolaan keuangan Masjid Ar Rahman Lappa-Lappae Kecamatan Suppa.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat dibagi menjadi dua bagian : kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmiah, bahan informasi dan bahan referensi mengenai implementasi *good governance*, khususnya dalam konteks lembaga keagamaan seperti masjid. Dan juga merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Institut Agama Islam Negeri Parepare.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi IAIN Parepare, khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, sebagai sumber referensi dan informasi terkait implementasi prinsip *good governance*, terutama dalam konteks lembaga keagamaan seperti masjid.

b. Bagi Penulis

Melalui pelaksanaan penelitian ini, peneliti diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan serta memperluas wawasan, sekaligus menjadikannya sebagai wahana untuk mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh di perguruan tinggi ke dalam kehidupan sosial masyarakat.

- c. Bagi Masyarakat, manfaat dari penelitian ini dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam bentuk kepercayaan terhadap lembaga keagamaan.
- d. Bagi penelitian lain, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan, referensi, dan perbandingan dalam penelitian selanjutnya, terkait dengan implementasi *good governance* dalam konteks lembaga keagamaan yakni masjid.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Kajian terhadap penelitian terdahulu ini menjadi salah satu landasan bagi penulis dalam melaksanakan penelitian, sehingga teori yang digunakan dapat diperkuat dan diperkaya. Dari hasil tinjauan tersebut, terdapat beberapa karya ilmiah yang relevan dengan topik penelitian ini, yaitu:

1. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rahmi yang berjudul “Akuntabilitas Dan Transparansi Keuangan Masjid Dalam Perspektif Islam”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi keuangan masjid dalam perspektif Islam yang dimaksud adalah yang pertama, kesadaran pengurus Masjid Babut Taubah Bontomanai bahwa Allah adalah “*The Ultimate Principal*” (nilai tauhid). Kedua, sikap Pengurus Masjid yang menggunakan dana masjid sesuai dengan aturan Tuhan (nilai khalifah). Ketiga, masjid menyediakan dana untuk para muballigh, caraka masjid dan guru mengaji. Masjid juga melaporkan keuangan masjid secara rutin (nilai keadilan).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menemukan praktek akuntabilitas dan transparansi keuangan masjid menurut Islam pada Masjid Babut Taubah Bontomanai. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi keuangan masjid dalam perspektif Islam yang dimaksud adalah yang pertama, kesadaran pengurus Masjid Babut Taubah Bontomanai bahwa Allah adalah “*The Ultimate Principal*” (nilai tauhid). Kedua, sikap Pengurus Masjid yang menggunakan dana masjid sesuai dengan aturan Tuhan (nilai khalifah). Ketiga, masjid menyediakan

dana untuk para muballigh, caraka masjid dan guru mengaji. Masjid juga melaporkan keuangan masjid secara rutin (nilai keadilan).¹²

Dalam penelitian yang dilakukan penulis memiliki beberapa persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmi. Kedua penelitian ini sama-sama membahas tentang pengelolaan keuangan masjid, menyoroti pentingnya prinsip-prinsip keterbukaan dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan untuk membangun dan menjaga kepercayaan jamaah. Selain itu, kedua penelitian menggunakan pendekatan Islam sebagai perspektif dasar dalam mengevaluasi pengelolaan keuangan masjid, mempertimbangkan nilai-nilai syariah dan etika Islam dalam pelaporan serta penggunaan dana masjid.

Namun, terdapat beberapa perbedaan signifikan antara kedua penelitian ini. Penelitian yang dilakukan penulis mengambil ruang lingkup yang lebih luas dengan menggunakan kerangka *good governance* yang mencakup berbagai prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dalam pengelolaan keuangan. Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh Rahmi lebih berfokus pada aspek akuntabilitas dan transparansi saja, tanpa mencakup keseluruhan prinsip *good governance*. Selain itu, objek penelitian adalah Masjid Ar Rahman Lappa-Lappae, yang memberikan fokus lokasi tertentu dalam mengevaluasi penerapan *good governance*. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Rahmi memiliki cakupan yang lebih umum atau mencakup beberapa masjid, sehingga memberikan pandangan yang lebih luas dan dapat diterapkan dalam konteks masjid lainnya.

2. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Imamah Afiatunnisah yang berjudul “Implementasi Prinsip *Good Corporate Governance* Dalam Pengelolaan Dana

¹² Rahmi, *Akuntabilitas Dan Transparansi Keuangan Masjid Dalam Perspektif Islam* (Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018).

Zakat, Infaq Dan Shadaqah (ZIS) Di Baitul Maal Bahtera pekalongan". Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan berupa observasi, wawancara dan dokumentasi, dengan metode analitik dan deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi prinsip *Good Corporate Governance* di Baitul Maal Bahtera Pekalongan sudah cukup baik, seperti pada keterbukaan akses informasi yang bisa diperoleh semua kalangan masyarakat, pengungkapan visi dan misi lembaga, keterkaitan tugas, tanggung jawab pengurus dengan visi dan misi lembaga, juga adanya penerapan sanksi dan penghargaan, adanya kepedulian terhadap masyarakat serta mengadakan perencanaan yang baik disetiap program yang akan dijalankan juga melakukan evaluasi setelahnya.¹³

Dalam penelitian yang dilakukan penulis, memiliki beberapa kesamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Imamah Afiatunnisah. Kedua penelitian ini memiliki kesamaan dalam topik utama, yaitu penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan dana yang bersumber dari umat, di mana transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab merupakan prinsip inti yang diutamakan. yang bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana keagamaan melalui tata kelola yang baik. Keduanya menyoroti pentingnya penerapan prinsip *good governance* dalam organisasi keagamaan untuk menjaga amanah serta kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan dana.

Adapun beberapa perbedaan antara kedua penelitian tersebut, dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, berfokus pada pengelolaan keuangan

¹³ Imamah Afiatunnisa, *Implementasi Prinsip Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Dana Zakat, Infaq Dan Shadaqah (ZIS) Di Baitul Maal Bahtera Pekalongan* (Pekalongan: STAIN Pekalongan, 2016).

masjid, yang cenderung lebih sederhana, sementara penelitian Imamah menyoroti pengelolaan dana ZIS di Baitul Maal, yang memiliki struktur organisasi formal dan aturan syariah ketat dalam pengelolaan dana. Selain itu, Fokus penelitian Imamah juga berada pada pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang memiliki regulasi dan panduan distribusi yang lebih ketat menurut hukum Islam, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis membahas keuangan masjid secara umum, yang penggunaannya lebih fleksibel.

3. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ismail yang berjudul "Tata Kelola Keuangan Masjid Taqwa Muhammadiyah Dan masjid Agung di Kabupaten Enrekang". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tatakelola Keuangan Pada Masjid Taqwa Muhammadiyah dan Masjid Agung Kabupaten Enrekang mengenai transparansi dan keakuntabilitasnya. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Masjid Agung Enrekang dan Masjid Taqwa Muhammadiyah telah menerapkan dan memahami konsep keterbukaan (transparansi) dan tanggung jawab (akuntabilitas) dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan masjid. Terbukti dari penerapan konsep keterbukaan (transparansi) bahwa seluruh pihak yang terlibat harus mengetahui dengan jelas laporan keuangan Masjid. Adapun bukti penerapan akuntabilitas yaitu, penyajian laporan keuangan terdiri dari penerimaan, pengeluaran, serta saldo akhir sudah diterapkan pada laporan keuangan masjid dilihat dari laporan keuangan masjid.¹⁴

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Kedua penelitian ini sama-sama membahas tata kelola keuangan di

¹⁴ Ismail, *Tata Kelola Keuangan Masjid Taqwa Muhammadiyah Dan Masjid Agung Di Kabupaten Enrekang* (Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2023).

masjid, dengan tujuan utama meningkatkan kualitas pengelolaan dana masjid untuk membangun kepercayaan masyarakat dan memastikan penggunaan dana yang tepat. Baik penelitian ini maupun penelitian yang dilakukan oleh penulis sama-sama menyoroti pentingnya prinsip akuntabilitas, transparansi, dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan masjid. Dengan menekankan tata kelola yang baik, keduanya bertujuan untuk mendukung pengelola masjid agar dapat menjalankan fungsi keuangan dengan lebih profesional dan beretika, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan jamaah terhadap pengelolaan dana masjid.

Namun, terdapat beberapa perbedaan antara kedua penelitian ini. Penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada penerapan prinsip *good governance* secara keseluruhan dalam pengelolaan keuangan di Masjid Ar Rahman Lappae-Lappae, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip *good governance* seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi. Sebaliknya, penelitian ini tidak secara khusus membahas konsep *good governance* tetapi lebih kepada aspek umum tata kelola keuangan di Masjid Taqwa Muhammadiyah dan Masjid Agung di Kabupaten Enrekang. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh penulis terfokus pada satu masjid, yaitu Masjid Ar Rahman, sedangkan Ismail membandingkan tata kelola keuangan di dua masjid dengan skala berbeda, yaitu Masjid Taqwa Muhammadiyah dan Masjid Agung, yang dapat memberi perbandingan antara masjid dengan skala dan struktur pengelolaan yang mungkin berbeda. Perbedaan fokus ini menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan penulis mengeksplorasi *good governance* secara mendalam dalam konteks masjid, sedangkan penelitian ini

menawarkan pandangan yang lebih luas dengan membandingkan tata kelola keuangan pada dua masjid dalam satu kabupaten.

4. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nur Akbar, yang berjudul "Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Masjid Nurul Amin Samata Berdasarkan PSAK 45". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan pada masjid dan melihat metode pencatatan laporan keuangan untuk organisasi nirlaba menurut PSAK 45 pada masjid Nurul Amin Samata. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Data dikumpulkan dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengurus masjid Nurul Amin memaknai akuntabilitas kedalam dua hal yakni yang pertama, akuntabilitas hamba kepada Allah sebagai bentuk pertanggungjawaban pengurus terhadap amanah dan kepercayaan yang diberikan dalam mengelola keuangan ummat, kedua, akuntabilitas hamba kepada hamba Allah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat dan jamaah atas pengelolaan keuangan masjid dengan melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas. Terkait PSAK 45, pengurus masjid belum melakukan pencatatan keuangan masjid berdasarkan PSAK 45 dikarenakan standar tersebut diakui belum pernah didengar oleh pengurus masjid, sehingga mereka hanya melakukan pencatatan secara sederhana.¹⁵

Penelitian ini memiliki berberapa persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Kedua penelitian ini berfokus pada pengelolaan keuangan masjid dengan tujuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Keduanya

¹⁵ Nur Akbar, *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Masjid Nurul Amin Samata Berdasarkan PSAK 45* (Makassar: UIN ALAUDDIN MAKASSAR, 2022).

mengedepankan pentingnya kejelasan dalam pengelolaan dana yang bersumber dari jamaah agar dapat dipertanggungjawabkan dengan baik dan transparan, serta memberikan rasa percaya kepada masyarakat mengenai penggunaan dana masjid. Penelitian ini sama-sama menilai pentingnya penerapan prinsip tata kelola yang baik dalam organisasi masjid, khususnya terkait akuntabilitas sebagai upaya membangun kepercayaan jamaah terhadap pengelolaan keuangan masjid.

Namun, terdapat beberapa perbedaan antara kedua penelitian ini. dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, menitikberatkan pada penerapan *good governance* secara keseluruhan, yang mencakup berbagai prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dalam pengelolaan keuangan masjid. Sementara itu, penelitian Nur Akbar lebih fokus pada prinsip akuntabilitas saja dalam kerangka standar akuntansi berbasis PSAK 45 (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 45), yang digunakan untuk organisasi nirlaba. PSAK 45 memberikan pedoman khusus untuk pelaporan keuangan organisasi nirlaba di Indonesia, termasuk masjid, dan mengutamakan aspek pelaporan dan penyajian informasi keuangan yang akuntabel dan mudah dipahami. Dengan demikian, penelitian yang dilakukan oleh penulis mengambil pendekatan yang lebih luas mengenai *good governance*, sementara penelitian Nur Akbar lebih mengarah pada pelaksanaan akuntabilitas yang spesifik berdasarkan standar akuntansi resmi.

5. Selanjutnya, dalam penelitian yang dilakukan oleh Nanang Setiawan yang berjudul “Urgensi Pengelolaan Keuangan Masjid Dalam Meningkatkan Akuntabilitas dan Pencegahan Terhadap *Fraud*”. Penelitian ini menggunakan studi literature dari penelitian sebelumnya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan masjid penting dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan.

Ruang lingkup pengelolaan keuangan masjid terdiri atas perencanaan keuangan, pengumpulan dana, pengelolaan dana, pelaporan keuangan, pengendalian internal dan analisis keuangan. Potensi dana masjid sangat besar dari sumber zakat, infaq, shodaqoh, wakaf dan dana yang berasal dari pemerintah. Oleh karenanya pengelolaan keuangan merupakan hal yang urgent dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada semua pemangku kepentingan, terlebih kepada Allah ta’ala. Pengelolaan keuangan, akuntabilitas dan transparansi keuangan serta pengawasan internal yang baik dilakukan sebagai bentuk pencegahan atas potensi *fraud* yang dapat merugikan organisasi dan dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat.¹⁶

Penelitian ini memiliki berberapa kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Keduanya sama-sama menyoroti pentingnya pengelolaan keuangan masjid yang baik sebagai langkah untuk meningkatkan akuntabilitas. Kedua penelitian tersebut mengedepankan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana masjid untuk membangun kepercayaan jamaah dan masyarakat. Namun, terdapat beberapa perbedaan antara kedua penelitian ini. Penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada penerapan *good governance* secara keseluruhan dalam pengelolaan keuangan masjid, dengan mencakup berbagai prinsip seperti partisipasi, transparansi, akuntabilitas. Sementara itu, penelitian Nanang Setiawan lebih terfokus pada urgensi pengelolaan keuangan masjid sebagai alat untuk meningkatkan akuntabilitas dan mencegah *fraud*, sehingga lebih menekankan pada aspek risiko dan pengendalian keuangan. Dengan demikian, meskipun kedua penelitian membahas tema yang

¹⁶ Nanang Setiawan, “Urgensi Pengelolaan Keuangan Masjid Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Dan Pencegahan Terhadap Fraud,” *Institut Attanwir Bojonegoro*, 2023.

terkait, masing-masing memiliki fokus dan pendekatan yang berbeda dalam mengeksplorasi pengelolaan keuangan masjid.

B. Tinjauan Teoritis

Tinjauan teori bertujuan untuk mengkaji serta menetapkan variabel-variabel yang relevan dengan tujuan penelitian. Teori-teori yang teridentifikasi akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kerangka pemikiran serta sebagai landasan untuk melakukan analisis dan pembahasan setelah data empiris diperoleh.¹⁷

1. *Good governance*

a. *Good Governance*

World Bank mendefinisikan *Good Governance* sebagai pelaksanaan manajemen pembangunan yang kuat dan bertanggung jawab, yang sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi, efisiensi pasar, pencegahan salah alokasi dana investasi, serta pengendalian korupsi baik di ranah politik maupun administratif. Selain itu, *Good Governance* juga meliputi penerapan disiplin anggaran serta pembentukan kerangka hukum dan politik yang mendukung perkembangan kegiatan usaha.¹⁸ Menurut *United Nations Development Programme* (UNDP) *Good governance* adalah suatu praktik pemerintahan yang baik yang melibatkan Partisipasi, Akuntabilitas, Transparansi, dan Keadilan yang bertujuan agar dapat mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

Joseph Stiglitz juga mengemukakan pendapatnya ia menekankan dalam setiap karyanya bahwa, *good governance* mencakup transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan juga akuntabilitas kepada publik. Dalam konteks

¹⁷ Firdaus dan Fakhry Zamzam, “Aplikasi Metodologi Penelitian” (Deepublish, 2018).

¹⁸ World Bank, *Governance and Development* (Washington DC: World Bank, n.d.).

organisasi nirlaba, *Good governance* memiliki peran penting dalam mendukung pengelolaan entitas secara efektif. Prinsip tata kelola ini bertujuan untuk membantu manajemen dalam mengatur, mengendalikan, menata, dan menganalisis organisasi secara terstruktur dan sistematis. Tata kelola dalam organisasi nirlaba merujuk pada cara pengelolaan dan pengaturan organisasi yang dilakukan untuk mencapai tujuan sosial atau kemasyarakatan tanpa berorientasi pada keuntungan.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *Good governance* adalah konsep tata kelola yang menekankan pada manajemen yang bertanggung jawab, transparan, dan efisien, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan akuntabilitas. Dalam organisasi nirlaba, penerapan *Good governance* sangat penting untuk memastikan pengelolaan yang terstruktur dan terkendali sehingga dapat mencapai tujuan sosial atau kemasyarakatan tanpa berorientasi pada keuntungan. Dengan pengelolaan yang baik, organisasi nirlaba mampu menciptakan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

b. Prinsip *Good governance*

Prinsip *good governance* dipahami sebagai suatu sistem pengendalian internal dalam perusahaan yang bertujuan utama untuk mengelola risiko-risiko signifikan. Sistem ini diterapkan guna mencapai tujuan bisnis dengan melindungi aset perusahaan serta meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang.

Menurut Adrian Sutedi, Prinsip-Prinsip *Good governance* meliputi : *Participation* (Partisipasi) *Transparancy* (Transparansi), dan *Accountability* (Akuntabilitas).¹⁹

1) Prinsip Transparansi

Transparansi memastikan Peluang dan kebebasan yang dimiliki oleh setiap individu untuk mengakses informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan atau organisasi. Informasi tersebut mencakup kebijakan, proses pengambilan keputusan dan pelaksanaannya, serta hasil yang telah dicapai.

2) Prinsip Akuntabilitas

Akuntabilitas publik mengacu pada sejauh mana pelaksanaan pelayanan memenuhi nilai-nilai dan norma-norma eksternal yang dianut oleh para pemangku kepentingan terkait dengan pelayanan tersebut

3) Partisipasi (*Participation*)

Partisipasi mencakup keterlibatan semua pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan. Dengan mengikutsertakan berbagai pihak, keputusan yang diambil dapat lebih mencerminkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat atau anggota organisasi.

Prinsip tata kelola organisasi nirlaba yang lainnya adalah memiliki etika dan integritas yang baik, ikut partisipasi dalam kesempatan yang ada, memiliki sistem pengendalian yang efektif, *responsibility*, kemandirian, *fairness* (kesetaraan dan kewajaran). Dengan menerapkan prinsip tata kelola yang baik,

¹⁹ Adrian Sutedi, *Good Corporate Governance* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

maka organisasi nirlaba diharapkan dapat meningkatkan dampak sosial bagi kinerjanya dan organisasi nirlaba dapat tumbuh menjadi organisasi yang baik.

c. Tujuan Tata Kelola Organisasi Nirlaba

Tata kelola memiliki tujuan utama untuk memastikan organisasi beroperasi secara efektif, dan bertanggung jawab. Selain itu, tata kelola bertujuan untuk menjaga kepatuhan terhadap hukum, peraturan, serta standar etika yang berlaku, sekaligus meminimalkan risiko yang dapat muncul. Dalam konteks organisasi nirlaba, tata kelola ditujukan untuk menjamin bahwa organisasi menjalankan operasinya secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab dalam mencapai tujuan sosial atau kemasyarakatan.

Adapun tujuan dari adanya tata kelola dalam organisasi nirlaba yaitu sbb:

1) Menghindari adanya kecurangan

Tata kelola dalam organisasi nirlaba bertujuan untuk mengatur semua pihak yang terlibat dalam operasional organisasi agar terhindar dari tindakan kecurangan yang dapat menimbulkan masalah dalam proses pengelolaannya.

2) Untuk memudahkan dalam proses pengelolaan

Tata kelola dalam organisasi nirlaba juga bertujuan untuk mempermudah pengelolaan organisasi, hal ini dikarenakan tata kelola membantu organisasi berjalan secara terarah dan sistematis.

3) Meningkatkan partisipasi anggota dalam entitas

Melibatkan anggota dan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan organisasi bertujuan untuk memperkuat partisipasi dan dukungan masyarakat dalam mencapai tujuan sosial.

4) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi

Upaya ini memastikan bahwa organisasi memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal dan efisien, sehingga tujuan sosial yang diharapkan dapat tercapai dengan maksimal.

5) Meningkatkan transparansi

Peningkatan keterbukaan dalam organisasi nirlaba memungkinkan masyarakat untuk memahami dan memantau aktivitas yang dilakukan. Transparansi juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menilai kinerja anggota organisasi secara objektif.²⁰

Dengan demikian, tata kelola dapat membantu organisasi nirlaba untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan dapat memaksimalkan nilai bagi para entitas/pemangku kepentingan (*stakeholder*). dengan adanya tata kelola yang baik dalam organisasi nirlaba, diharapkan segala tujuan yang ditetapkan oleh organisasi dapat berjalan dengan baik dan terarah.

d. Kendala Tata Kelola Organisasi Nirlaba

Kendala dalam tata kelola organisasi nirlaba cukup kompleks karena organisasi ini tidak berorientasi pada keuntungan, namun tetap dituntut untuk menjalankan kegiatan secara efisien, transparan, dan akuntabel. Adapun beberapa kendala yang biasanya dihadapi oleh Organisasi nirlaba sebagai berikut:

1) Kurangnya Sumber Daya Manusia Profesional

Banyak organisasi nirlaba mengandalkan relawan atau tenaga kerja dengan keterbatasan keahlian manajerial, keuangan, dan administrasi.

²⁰ Melli Dwi Agusti, *Akuntansi Organisasi Nirlaba* (SADA KURNIA PUSTAKA, 2023).

2) Minimnya Dana Operasional

Sumber pendanaan bergantung pada donatur, hibah, atau sumbangan, yang sifatnya tidak tetap. Serta Alokasi dana seringkali hanya fokus pada program kegiatan, sementara kebutuhan operasional tidak tercukupi.

3) Keterbatasan dalam Transparansi dan Akuntabilitas

Tidak semua organisasi memiliki sistem pelaporan keuangan dan dokumentasi yang memadai.

2. Pengelolaan Keuangan Masjid

Pengelolaan keuangan masjid merupakan aktivitas administratif yang mencakup proses pencatatan, penerimaan, dan pengeluaran kas, serta penyusunan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana. Kegiatan ini dilakukan oleh pimpinan yang mengarahkan staf atau pihak yang bertanggung jawab di bidang keuangan, dengan menerapkan fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, penganggaran, pencatatan, pengeluaran, dan pelaporan pertanggungjawaban.²¹

Pengurus masjid tidak hanya harus memantau penggunaan dan penerimaan uang, mereka juga harus mencatat laporan keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban kepada jamaah, dimana secara tidak langsung pengurus diberikan amanah untuk mengelola dana secara bertanggung jawab dan efektif. Meskipun demikian, laporan keuangan pengurus masjid tetap sangat sederhana, laporan keuangan disusun dalam format laporan kas yang terdiri dari empat kolom utama, yaitu uraian, penerimaan, pengeluaran, dan saldo. Pengelolaan masjid dilakukan oleh takmir masjid, yang bertanggung jawab menjalankan operasional masjid serta menyediakan informasi yang dibutuhkan, seperti fasilitas

²¹ Setiyawan Muhammad Syaifuddin, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba," *Jurnal Akuntansi*, 2006.

yang tersedia, kebutuhan peralatan harian, kegiatan yang harus dilaksanakan, serta strategi pengalokasian sumber daya untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Aliran keuangan masjid dapat diidentifikasi melalui berbagai aktivitas, antara lain:

a. Pengumpulan Dana

Pengumpulan dana dilakukan oleh pengurus masjid guna memenuhi kebutuhan pembiayaan seluruh kegiatan masjid. Pengurus melaksanakan berbagai upaya penggalangan dana, antara lain dengan mengajukan proposal, menyediakan kotak amal, serta menjalankan aktivitas jasa dan ekonomi lainnya.

b. Pemasukan dan pengeluaran

Dana yang telah terkumpul selanjutnya diserahkan kepada bendahara dengan persetujuan ketua umum melalui mekanisme formulir penyerahan dana. Dana tersebut kemudian dicatat dan disimpan dalam kas keuangan atau rekening bank.

c. Pengawasan

1) Dokumen Bukti

Beragam dokumen bukti yang dapat digunakan mencakup: kuitansi, nota, deklarasi, kupon, dan dokumen serupa lainnya.

2) Dokumen Informasi

Laporan terkait pengumpulan dan pengelolaan dana setiap bulan disampaikan oleh Bendahara.

3) Papan Pengumuman

Informasi keuangan Kenaziran Masjid disampaikan kepada publik melalui pemasangan pada papan pengumuman.

4) Laporan Rutin

Bendahara secara rutin menyampaikan laporan pengelolaan dana melalui forum Rapat Umum serta dalam Laporan Tahunan Pengurus. Laporan ini juga merupakan bagian integral dari pertanggungjawaban pengurus yang disampaikan dalam musyawarah jamaah.

5) Forum/Lembaga Pengawas

Pengawasan langsung terhadap pengelolaan keuangan dapat dilakukan melalui beberapa forum atau lembaga, seperti:

- a) Rapat Umum
- b) Rapat Pleno
- c) Majelis Syura
- d) Musyawarah Jama'ah

Dalam struktur organisasi masjid, pengelolaan keuangan dan administrasi merupakan elemen yang sangat penting. Pengelolaan keuangan yang baik menunjukkan bahwa pengurus masjid adalah individu yang bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Sebaliknya, jika pengelolaan keuangan tidak dilakukan dengan baik, hal ini dapat menimbulkan fitnah serta menciptakan persepsi yang buruk terhadap integritas dan tanggung jawab pengurus masjid.²²

3. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan bentuk tanggung jawab yang diserahkan oleh masyarakat kepada pihak yang dipercaya, dengan hasil yang dapat berupa keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaiannya. Tingkat akuntabilitas akan meningkat apabila didukung oleh sistem akuntansi yang mampu menyediakan

²² Subagya, "Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Masjid Berdasarkan Prinsip Akuntansi Syariah (Studi Masjid Baitul Mu'minin Kab. Lampung Tengah)."

informasi secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.²³

Akuntabilitas keuangan mengacu pada tanggung jawab atas integritas keuangan, keterbukaan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan dari pertanggungjawaban ini adalah untuk menyusun laporan keuangan yang akurat dan sesuai dengan ketentuan yang mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran dana.²⁴ Akuntabilitas kejujuran merupakan akuntabilitas lembaga publik agar dapat berperilaku jujur untuk bekerja serta taat akan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini perlu transparansi dalam penggunaan dana publik dengan baik dan benar.²⁵

Jadi dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas adalah tanggung jawab yang diberikan kepada pihak yang dipercaya, dengan hasil berupa keberhasilan atau kegagalan. Peningkatan akuntabilitas dapat diwujudkan melalui penerapan sistem akuntansi yang mampu menghasilkan informasi yang tepat waktu, akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks akuntabilitas keuangan, tanggung jawab meliputi aspek integritas, keterbukaan, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku

Dalam ranah akuntansi, akuntabilitas merupakan suatu upaya untuk menghasilkan pengungkapan informasi yang akurat dan benar. Pertanggungjawaban atas pengungkapan tersebut terlebih dahulu ditujukan kepada Allah. Akuntabilitas juga memiliki dimensi sosial, di mana seorang *Muhtasib*

²³ Nurjannah N, “Akuntabilitas Dan Pengelolaan Keuangan Masjid: PSAK No. 45 Tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba” (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018).

²⁴ Halim, *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*.

²⁵ Fatimah Fatimah and Indrayani Indrayani, “PENERAPAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH SEBAGAI PROSES AKUNTABILITAS PUBLIK (Studi Kasus Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Sidenreng Rappang),” *Economos : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 2, no. 2 (2019).

(akuntan) meyakini bahwa penerapan hukum syariah telah berjalan dengan baik serta kesejahteraan umat menjadi tujuan utama dari aktivitas organisasi yang telah terealisasi. Dari segi tanggung jawab, akuntabilitas merupakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan misi organisasi guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang dilaksanakan melalui mekanisme pertanggungjawaban secara berkala

a. Konsep Akuntabilitas Dalam Organisasi Keagamaan

Akuntabilitas adalah prinsip yang memastikan bahwa setiap aktivitas entitas atau individu dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat. Bentuk akuntabilitas masjid tercermin dalam penerapan akuntansi untuk mencatat transaksi keuangan, mengelola dana dengan amanah sesuai tujuan, serta menyusun laporan keuangan yang dapat diandalkan. Semakin tinggi akuntabilitas dalam pengelolaan masjid, semakin besar potensi penerimaan dana organisasi. Oleh karena itu, dengan berbagai sumber dana yang dimiliki oleh masjid, penerapan akuntansi menjadi sangat penting dalam sistem pengelolaan keuangan, terutama untuk memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan dana, serta untuk mencegah kesalahan atau penyalahgunaan.

Akuntabilitas publik merupakan kewajiban bagi pihak yang menerima tanggung jawab untuk mengelola, melaporkan, serta mengungkapkan seluruh aktivitas yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya publik kepada masyarakat. Konsep akuntabilitas ini berbeda dengan sekadar tanggung jawab, karena secara khusus mengacu pada kewajiban pengelolaan dan pelaporan penggunaan sumber daya publik secara transparan. Dalam perspektif Islam, akuntabilitas memiliki makna filosofis sebagai amanah. Akuntabilitas menurut

Islam mencakup aspek ekonomi, politik, keagamaan, dan sosial, sehingga menjadi mekanisme pengaturan sumber kehidupan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadits. Selain aspek duniawi dan finansial, akuntabilitas Islam juga menekankan pencapaian keberkahan dari Allah SWT.²⁶

Entitas keagamaan seperti masjid, gereja, dan vihara termasuk organisasi nirlaba yang berperan sebagai komunitas atau lembaga sosial. Akuntabilitas terbagi menjadi dua jenis, yaitu akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertikal merujuk pada tanggung jawab yang diberikan kepada otoritas yang lebih tinggi, sementara akuntabilitas horizontal mengacu pada tanggung jawab yang diberikan kepada publik secara umum atau kepada lembaga lain yang tidak memiliki hubungan atasan-bawahan.²⁷

Akuntabilitas vertikal adalah bentuk pelaksanaan tugas yang dilakukan dengan ikhlas dalam mengelola dan memakmurkan masjid sebagai amanah. Dalam menerima amanah tersebut, pengurus masjid bertanggung jawab untuk menjaga dan memastikan masjid berfungsi sebagaimana mestinya, tanpa adanya kepentingan dari golongan tertentu. Akuntabilitas vertical ialah yang langsung berhubungan dengan Allah SWT. Kerja ikhlas para pengurus tercermin dalam pelaksanaan tugas mereka tanpa imbalan gaji. Hal ini membuat pengukuran kinerja menjadi sulit, karena mereka menjalankan tanggung jawab semata-mata karena Allah SWT.

²⁶ J.E. Prasetyo, "Kajian Teoritis Akuntabilitas", vol. 1 (Tazkiyatun Nafs, 2017).

²⁷ Suginam S, "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat Berbasis Teknologi Informasi Pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ).," *Journal of Economics and Accounting*, 2020.

Sedangkan akuntabilitas horizontal merujuk pada bentuk pertanggungjawaban yang diberikan kepada publik secara luas atau kepada lembaga lain yang sejajar tanpa adanya hubungan hirarkis antara atasan dan bawahan. Dalam konteks pengelolaan keuangan masjid, akuntabilitas horizontal diwujudkan melalui pertanggungjawaban pengurus kepada jamaah sebagai pihak yang memiliki hak atas pengelolaan dana tersebut. Akuntabilitas ini mencerminkan kewajiban pengurus untuk melaporkan pengelolaan keuangan kepada pihak yang setara dan berhak mengetahui hasilnya. Implementasi akuntabilitas horizontal oleh pengurus masjid dapat dilihat dari penyampaian laporan keuangan yang dipublikasikan melalui papan informasi di masjid, sehingga dapat diakses oleh seluruh jamaah, termasuk para donatur infaq dan sedekah, pengurus yang memantau kondisi keuangan, serta pengunjung dari luar daerah yang beribadah di masjid tersebut. Dengan demikian, laporan tersebut menjadi wujud pertanggungjawaban pengurus kepada publik secara transparan.²⁸

b. Dampak Akuntabilitas Terhadap Kepercayaan Masyarakat

Akuntabilitas dalam organisasi nirlaba memiliki dampak signifikan terhadap kepercayaan masyarakat yaitu :

1) Meningkatkan kepercayaan

Ketika masyarakat melihat bahwa organisasi mengelola laporan keuangannya dengan tanggung jawab dan transparansi, mereka akan lebih cenderung untuk memberikan kepercayaan kepada organisasi tersebut.

2) Mendorong partisipasi

²⁸ Dahnil Anzar Simanjuntak and Yeni Januars, "Akuntabilitas Dan Pengelolaan Keuangan Di Masjid," *Simposium Nasional Akuntansi XIV Aceh*, 2011.

Organisasi yang menunjukkan akuntabilitas cenderung menerima lebih banyak dukungan dari masyarakat. masyarakat akan lebih terdorong untuk ikut serta dalam kegiatan, memberikan sumbangan atau terlibat dalam program-program yang dijalankan oleh organisasi.

3) Meningkatkan reputasi

Organisasi yang secara konsisten menerapkan akuntabilitas dan transparansi akan membangun citra positif di mata masyarakat.²⁹

Dengan demikian, akuntabilitas memiliki peran yang sangat penting dalam membangun dan menjaga kepercayaan masyarakat. Organisasi yang dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas yang tinggi akan lebih sukses dalam menarik dukungan dan partisipasi dari masyarakat.

4. Transparansi

Transparansi merupakan salah satu aspek krusial dalam penerapan prinsip *good governance*. Dalam berbagai literatur, transparansi seringkali dikaitkan erat dengan akuntabilitas, dimana keduanya berperan sebagai fondasi utama dalam pelaksanaan *good governance*. Transparansi dapat didefinisikan sebagai keterbukaan informasi, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam penyajian informasi yang bersifat material dan relevan mengenai suatu organisasi atau perusahaan. Selain akuntabilitas, transparansi juga menjadi elemen penting dalam pengelolaan keuangan yang efektif. Transparansi menandakan adanya keterbukaan dalam penyediaan informasi keuangan yang sesuai dengan ketentuan

²⁹ Arisdhia Khairun Nisa, “Penerapan Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Laporan Keuangan Dalam Mengelola Organisasi Nirlaba (Studi Kasus Masjid Agung Al-Umaraini Dan Partai Keadilan Sejahtera)” (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017).

dari masyarakat maupun pemerintah daerah yang memiliki hak untuk memperoleh informasi tersebut.

Konsep transparansi mencakup makna yang sangat komprehensif, dimana terdapat sejumlah prinsip dasar yang harus diimplementasikan dalam praktiknya, antara lain:

- 1) Menyediakan informasi dan Menjamin kemudahan akses terhadap informasi yang relevan terkait seluruh aktivitas yang dilaksanakan dalam lingkup organisasi. Pengurus masjid secara terbuka menyampaikan informasi yang bersifat penting, seperti laporan keuangan serta rancangan anggaran untuk kegiatan pembangunan. Selain itu, bendahara turut mendokumentasikan seluruh bukti transaksi, termasuk kuitansi dan tanda pembayaran, guna memastikan pencatatan yang tertib dan akurat, sehingga informasi tersebut dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan apabila diperlukan.
- 2) Informasi tersebut harus disampaikan secara lengkap, di mana pimpinan masjid memberikan informasi kepada masyarakat dan donatur, mencakup kondisi keuangan, rencana yang ada, serta hasil operasional. Laporan keuangan masjid disampaikan kepada jamaah dan masyarakat secara berkala setiap pekan, tepatnya sebelum pelaksanaan salat Jumat. Informasi yang disajikan harus memenuhi prinsip keterbukaan, mudah diakses oleh publik, disampaikan secara rutin, serta senantiasa diperbarui agar mencerminkan kondisi keuangan yang aktual.
- 3) Menyediakan ruang partisipatif bagi jamaah dan masyarakat untuk menyampaikan pendapat, saran, maupun kritik yang konstruktif demi perbaikan kegiatan secara lebih terarah. Pengurus masjid secara terbuka menerima berbagai masukan tersebut sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja organisasi, yang pada

akhirnya dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas pengelolaan masjid.³⁰

Pengurus keuangan masjid memprioritaskan transparansi kepada masyarakat sekitar, khususnya jamaah dan donatur. Publikasi keuangan masjid sangat penting karena dapat meningkatkan rasa percaya masyarakat, jamaah, dan donatur. Akuntabilitas dan transparansi menjadi hal yang penting bagi para pemangku kepentingan, karena keduanya dapat memperkuat kepercayaan muzakki terhadap dana yang terkumpul.

a. Transparansi dalam perspektif islam

Dalam perspektif Islam, transparansi dimaknai sebagai keterbukaan dalam menerima dan menyampaikan informasi yang berasal dari pihak pengelola suatu organisasi. Konsep ini sejalan dengan ajaran yang terkandung dalam Al-Qur'an, khususnya pada Q.S. Al-Hujurat ayat 6, yang menekankan pentingnya verifikasi informasi sebelum diterima atau disebarluaskan.

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang Fasik membawa suatu berita. Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpa suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu".³¹

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa tabayyun diperlukan untuk membuktikan kebenaran suatu informasi, namun sikap tabayyun terhadap informasi tidak berarti berburuk sangka terhadap sesama muslim. Nilai-nilai transparansi juga tercermin

³⁰ F.A. Mahardika , M.,Prasetyo,A., Dan Amalia, "Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Masjid," *El Muhasaba Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 2022.

³¹ "Al-Quran Kementerian Agama RI, Alquran Dan Terjemahannya, Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2020," n.d.

dalam Al-Qur'an, khususnya pada surah Al-Baqarah ayat 143, yang menegaskan pentingnya sikap adil, terbuka, dan bertanggung jawab sebagai umat pertengahan (ummatan wasathan).

Yang artinya : Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) "umat pertengahan" agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang (dahulu) kamu (berkiblat) kepadanya melainkan agar Kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh, (pemindahan kiblat) itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia.³²

Berdasarkan pandangan Al-Ghazali, maslahah adalah pertimbangan untuk mendatangkan manfaat dan mencegah bahaya yang harus selaras dengan tujuan syariah serta mengutamakan kepentingan umum. Konsep ini sangat berkaitan erat dengan pentingnya transparansi, khususnya dalam konteks pengelolaan keuangan, pemerintahan, dan lembaga sosial keagamaan seperti masjid. Transparansi merupakan wujud nyata dari pelaksanaan konsep maslahah menurut Al-Ghazali, karena membantu mendatangkan manfaat umum, mencegah kerusakan, dan menjamin keadilan bagi seluruh umat. Tanpa transparansi, kemaslahatan sulit tercapai karena tertutupnya informasi dapat menimbulkan konflik, kesalahpahaman, dan ketidakadilan yang merugikan masyarakat luas.³³

³² "Al-Quran Kementerian Agama RI, Alquran Dan Terjemahannya, Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2020."

³³ Amiruddin, Muhammad Majdy et al., "Maslahah as an Islamic Source and Its Application in Financial Transactions," *Journal of Research in Humanities and Social Science* 2, (2014).

Dapat disimpulkan bahwa dalam konsep Islam, transparansi mencakup kejujuran dan keterbukaan dalam menyampaikan informasi serta membuktikan kebenarannya melalui proses tabayyun. Kejujuran (shidq) diartikan sebagai sikap transparan dalam berbicara, bertindak, dan melaksanakan ketentuan agama, yang bertujuan untuk menghindari kesalahan dan kerusakan akibat informasi yang salah. Islam mengajarkan agar umatnya menjadi saksi yang jujur dan transparan dalam segala hal, termasuk dalam komunikasi dan tindakan, sebagaimana diuraikan dalam Al-Qur'an.

Menurut Humanitarian Forum Indonesia, transparansi mencakup sejumlah prinsip penting, di antaranya kemudahan dalam memahami serta mengakses informasi, ketersediaan data mengenai pemanfaatan sumber daya yang dapat dijangkau oleh publik, dan adanya pelaporan yang dipublikasikan melalui berbagai media. Selain itu, prinsip transparansi juga diwujudkan melalui penyusunan laporan tahunan, kepemilikan sarana publikasi oleh organisasi, serta adanya pedoman atau standar yang mengatur proses penyebarluasan informasi secara sistematis.³⁴

b. Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Masjid

Transparansi dalam pengelolaan keuangan masjid mengacu pada keterbukaan dan kejelasan di semua aspek yang terkait dengan pengelolaan dana dan sumber daya keuangan masjid. Ini sangat penting untuk membangun kepercayaan di kalangan jamaah dan masyarakat, serta untuk memastikan bahwa dana yang terkumpul digunakan dengan cara yang efektif dan efisien. Adapun beberapa aspek penting dari transparansi dalam pengelolaan keuangan masjid yaitu:

³⁴ Rahmi, *Akuntabilitas Dan Transparansi Keuangan Masjid Dalam Perspektif Islam*.

1) Penyampaian informasi keuangan

Masjid perlu menyediakan laporan keuangan yang jelas dan mudah dimengerti, termasuk laporan mengenai pendapatan dan pengeluaran. Laporan tersebut harus dapat diakses oleh seluruh jamaah dan masyarakat umum.

2) Penggunaan Dana

Setiap pengeluaran harus dijelaskan secara rinci, mencakup tujuan dan manfaat dari pengeluaran tersebut. hal ini akan membantu jamaah memahami bagaimana sumbangan mereka digunakan.

3) Keterlibatan jamaah

Jamaah sebaiknya dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan mengenai penggunaan dana. Hal tersebut dapat dilakukan melalui forum musyawarah.

Dengan menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan gan, masjid tidak hanya akan membangun kepercayaan di kalangan jamaah, tetapi juga memastikan bahwa pengelolaan dana dilakukan dengan cara yang akuntabel dan bertanggung jawab.³⁵

5. Partisipasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) partisipasi adalah perihal turut berperan serta di suatu kegiatan. Teori partisipasi dalam konteks Good governance menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan. Partisipasi merupakan salah satu prinsip penrting dalam good governance. Partisipasi merujuk pada keterlibatan individu atau kelompok dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan dan

³⁵ Maulana Fauzi Abrar, “Akuntabilitas Dan Transparaansi Pelaporan Keuangan Masjid (Studi Empiris : Masjid JAMI’ Di Kota Banda Aceh),” 2020.

kebijakan publik. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat³⁶.

a. Manfaat Partisipasi

Partisipasi merupakan salah satu prinsip dari *Good governance* yakni merujuk pada keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Partisipasi memiliki banyak manfaat antara lain.

- 1) Dengan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, para pengambil keputusan menjadi lebih bertanggung jawab atas tindakan mereka. Partisipasi dapat mengurangi risiko korupsi dikarenakan adanya transparansi.
- 2) Partisipasi memungkinkan pengambil keputusan untuk mendapatkan perspektif yang luas, yang dapat meningkatkan kualitas keputusan yang diambil.
- 3) Ketika masyarakat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, hasilnya akan lebih mudah diterima dan dianggap sah.³⁷

b. Strategi untuk meningkatkan transparansi

1. Membangun komunikasi yang efektif

Perlu untuk menyediakan informasi yang jelas dan terbuka kepada masyarakat terkait proses pengambilan keputusan dan kebijakan yang ada.

2. Penggunaan Teknologi

³⁶ Irma Sunarty Purba dan Djanius Djamin, “Partisipasi Masyarakat Dalam Meningkatkan Good Governance Di Tingkat Desa,” *Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA*, 2015.

³⁷ J. Kooiman, *Governing as Governance* (SAGE Publications, 2003).

Menggunakan teknologi informasi sebagai fasilitas dalam partisipasi, seperti penggunaan platform online untuk survei, forum untuk diskusi, dan pengumpulan umpan balik.

3. Pendidikan

Masyarakat perlu diberikan pendidikan tentang hak-hak mereka dan bagaimana cara berpartisipasi dalam suatu organisasi. Hal ini dapat dilakukan melalui seminar, dan program pendidikan masyarakat.³⁸

C. Tinjauan Konseptual

1. Implementasi

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Implementasi memiliki arti yakni pelaksanaan atau penerapan.³⁹ Sementara itu, Nurdin Usman dalam bukunya Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum menjelaskan bahwa implementasi merupakan serangkaian aktivitas atau tindakan yang mencerminkan adanya mekanisme dalam suatu sistem. Implementasi bukan sekadar kegiatan biasa, melainkan suatu proses yang dirancang secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Sejalan dengan itu, menurut Jones, implementasi adalah “*those activities directed toward putting a program into effect,*” yang berarti serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk mewujudkan suatu program hingga menghasilkan dampak nyata. Dengan demikian, implementasi dapat dipahami sebagai tindakan nyata yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan,

³⁸ Muhammadiyah, “Partisipasi Publik Sebagai Strategi Mewujudkan *Good Governance* Otonomi Daerah,” *Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA*, 2013.

³⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi keempat (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012).

sebagai upaya agar kebijakan tersebut dapat mencapai sasaran yang telah dirumuskan.⁴⁰

Dengan demikian, implementasi dapat dimaknai sebagai suatu kegiatan yang dirancang secara sistematis, bukan sekadar aktivitas biasa, melainkan dilakukan secara serius dan berlandaskan pada norma-norma tertentu, dengan tujuan untuk mencapai hasil atau sasaran yang telah ditetapkan.

2. *Good governance*

World Bank mendefinisikan *good governance* sebagai pengelolaan pembangunan yang kuat dan akuntabel, yang selaras dengan prinsip-prinsip demokrasi, efisiensi pasar, serta upaya pencegahan kesalahan alokasi dana investasi. Selain itu, *good governance* juga meliputi penanggulangan praktik korupsi baik dalam ranah politik maupun administratif, penerapan disiplin anggaran yang ketat, serta pembentukan kerangka hukum dan politik yang kondusif untuk mendukung pertumbuhan aktivitas ekonomi.⁴¹ Dalam konteks pengelolaan masjid, *good governance* mengacu pada penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam mengatur seluruh aspek organisasi, khususnya dalam hal pengelolaan keuangan. Prinsip-prinsip tersebut meliputi akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Implementasi *good governance* bertujuan untuk menjamin bahwa dana serta sumber daya yang dikelola oleh masjid digunakan secara bertanggung jawab, efisien, dan sesuai dengan ekspektasi jamaah maupun para donatur.⁴² Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *good governance* merupakan penerapan tata kelola yang akuntabel, transparan, dan adil guna

⁴⁰ Mulyadi, *Implementasi Kebijakan* (Jakarta: Balai Pustaka, 2015).

⁴¹ World Bank, *Governance and Development*.

⁴² Suci Meinarti and S Masnawaty, “Analisis Implementasi *Good Governance* Terhadap Pengelolaan Keuangan Organisasi Nirlaba Pada Yayasan Pendidikan Rezki Prasetya Makassar,” 2024.

menjamin pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab serta dapat dipercaya oleh jamaah.

3. Pengelolaan Keuangan Masjid

Pengelolaan keuangan masjid merupakan kegiatan administratif yang mencakup pencatatan seluruh penerimaan dan pengeluaran kas serta penyusunan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana tersebut. Proses pengelolaan ini dilakukan oleh pimpinan dengan mengarahkan staf yang bertanggung jawab di bidang keuangan, melalui penerapan fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, penganggaran, pencatatan, pengeluaran, serta pelaporan pertanggungjawaban.⁴³

Pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan masjid merupakan aspek krusial yang berperan penting dalam menjaga keberlangsungan dan kemakmuran masjid. Hal ini dikarenakan masjid memerlukan dana yang cukup signifikan setiap bulan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan ibadah, aktivitas keagamaan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana yang ada.⁴⁴ Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan masjid merupakan kegiatan administratif yang meliputi pencatatan sumber penerimaan kas, pengeluaran, serta penyusunan pertanggungjawaban atas penggunaan dana masjid. Dalam struktur organisasi masjid, pengelolaan keuangan memegang peranan yang sangat penting. Pelaksanaan pengelolaan keuangan yang baik menunjukkan bahwa pengurus masjid bertindak dengan tanggung jawab dan dapat dipercaya. Sebaliknya, jika pengelolaan keuangan tidak dilakukan dengan

⁴³ Syaifuddin, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba.”

⁴⁴ Pepie Diptyana, “Pelatihan Pencatatan Keuangan Dengan Identifikasi Aktivitas Untuk Penganggaran Masjid” (Surabaya: STIE Perbanas Surabaya, 2009).

benar, hal tersebut dapat menimbulkan fitnah serta merusak reputasi pengurus masjid.

4. Masjid

Masjid berfungsi sebagai tempat ibadah sekaligus pusat aktivitas sosial kemasyarakatan. Sebagai sebuah organisasi nirlaba, masjid memiliki kewajiban untuk menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas dana yang diterima dan digunakan, yang harus disampaikan kepada pihak-pihak yang memerlukan informasi tersebut. Masjid sangat bergantung pada donatur serta jamaah sebagai penerima manfaat. Oleh karena itu, akuntabilitas masjid sebagai entitas keagamaan di sektor publik menjadi hal yang sangat krusial. Dalam konteks organisasi nirlaba, keberhasilan masjid biasanya diukur menggunakan beberapa indikator, seperti total dana donasi yang diperoleh, peningkatan jumlah anggota, volume kunjungan jamaah, jumlah penerima layanan, serta kemampuan dalam mengendalikan biaya operasional.⁴⁵

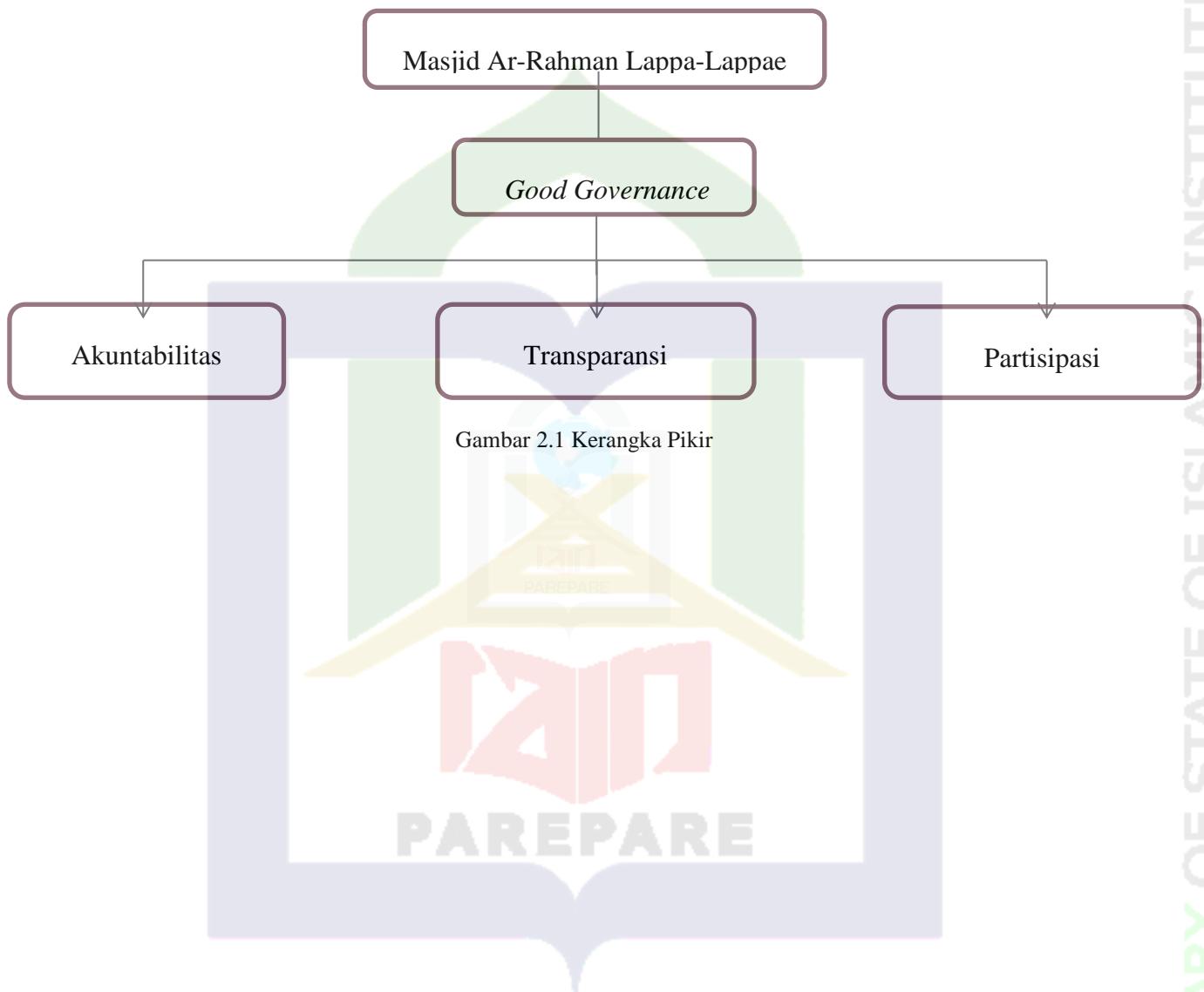
D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan representasi atau model konseptual yang menjelaskan hubungan antar variabel secara sistematis. Hubungan tersebut disajikan dalam bentuk diagram atau skema guna memudahkan pemahaman dan analisis terhadap keterkaitan antar variabel yang dikaji.⁴⁶ Kerangka pikir dalam penelitian ini difokuskan pada tingkat penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan keuangan masjid. Kerangka pikir yang digunakan dalam studi ini

⁴⁵ Al-atqiyah, “Penerapan Isak No.35 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba Pada Masjid Besar Al-Atqiyah Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa,” 2021.

⁴⁶ Muhammad Kamal Zubair, *Penulisan Karya Ilmiah Berbasis Tekhnologi Informasi* (Parepare: institut Agama Islam Negeri Parepare, 2020).

disajikan dalam bentuk gambar berikut, yang berfungsi untuk mempermudah pemahaman serta memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaan penelitian.



BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pemilihan metode penelitian sangat berkaitan dengan usaha peneliti dalam menjawab masalah penelitian. Dalam proses ini, peneliti memilih, metode penelitian yang sesuai dengan prinsip parsimoni. Prinsip parsimoni merupakan prinsip yang berarti dalam pemilihan metode penelitian harus selaras dengan permasalahan yang dihadapi.⁴⁷ Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang disajikan dalam bentuk kata dan kalimat, menghasilkan data dalam bentuk bahasa lisan, bahasa tulis, atau perilaku yang dapat diamati. Dengan demikian, metode penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan sistematis yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam proses mengidentifikasi dan menjelaskan fenomena sosial yang diteliti.

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung pada peristiwa atau kondisi yang sesungguhnya.⁴⁸ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi langsung di lapangan, sehingga memungkinkan untuk berinteraksi lebih dekat dengan individu-individu yang berada dalam lingkungan penelitian. Pendekatan ini bertujuan agar data yang diperoleh dapat mencerminkan kondisi dan realitas yang sebenarnya. Penelitian ini menggunakan data kualitatif dengan beberapa alasan. Pertama, metode kualitatif lebih efektif dalam menghadapi kompleksitas dinamika sosial yang beragam. Kedua, metode ini memungkinkan adanya hubungan yang lebih intens dan autentik antara peneliti dan responden. Ketiga, pendekatan kualitatif

⁴⁷ Sapto Haryoko, Bahartiar, and Fajar Arwadi, *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis)* (Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, 2020).

⁴⁸ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN Po Press ,2010).

memiliki kepekaan yang tinggi serta kemampuan adaptasi yang baik dalam menangkap pengaruh bersama terhadap pola nilai yang muncul dalam konteks penelitian.⁴⁹

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dijadikan tempat berlangsungnya penelitian ini adalah di desa Lappa-Lappae, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang. Lokasi penelitian ialah tempat dimana akan dilaksanakannya penelitian, yang akan memberikan kejelasan tentang penelitian yang dilakukan. Alasan pemilihan lokasi, dikarenakan Masjid Ar Rahman Lappa-Lappae merupakan masjid yang memiliki lokasi yang strategis, yang menjadikannya sebagai salah satu masjid yang sering dikunjungi oleh jamaah, baik dari masyarakat setempat maupun luar daerah. Hal ini mencerminkan potensi besar dalam pengelolaan keuangan yang harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan efektif agar dapat memberikan manfaat optimal.

2. Waktu Penelitian

Waktu yang dibutuhkan peneliti untuk menyusun penelitian adalah 1 bulan.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan aspek-aspek utama yang menjadi objek pencarian jawaban dalam suatu penelitian. Penentuan fokus penelitian sangat penting untuk memberikan arahan kepada peneliti selama proses penelitian, terutama pada tahap pengumpulan data, guna membedakan antara data yang relevan dan tidak relevan. Dalam penelitian kualitatif, pembatasan fokus didasarkan pada tingkat

⁴⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2004).

urgensi atau kepentingan masalah yang dihadapi. Berdasarkan judul yang dirumuskan, fokus penelitian ini adalah mengenai penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan keuangan di Masjid AR-Rahman Lappa-Lappae, Kecamatan Suppa.

D. Jenis Dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data deskriptif kualitatif. Data kualitatif adalah data yang tidak berbentuk numerik atau angka. Biasanya analisis data ini memuat kondisi terkini dalam suatu organisasi atau kelompok, sehingga membantu peneliti mengidentifikasi permasalahan. Data kualitatif dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dan observasi.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini merujuk pada subjek atau objek yang menjadi lokasi pengumpulan data. Dalam penelitian ini, penulis memanfaatkan dua jenis sumber data, yaitu sebagai berikut:

- a. Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, seperti responden melalui kuesioner, diskusi kelompok, atau hasil wawancara dengan narasumber, yang kemudian diolah lebih lanjut. Dalam penelitian ini, pengambilan data primer dilakukan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara terhadap pengurus masjid beserta dengan jamaah masjid.
- b. Data sekunder adalah data yang diambil dari catatan, buku referensi, artikel, jurnal, makalah, skripsi, dan sejenisnya. Dokumen yang digunakan

dalam penelitian ini mencakup buku, jurnal, laporan keuangan masjid serta penelitian sebelumnya yang relevan.⁵⁰

E. Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Data

1. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penyusunan proposal ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research). Melalui metode ini, peneliti secara langsung terjun ke lokasi penelitian guna memperoleh data yang nyata dan relevan dengan topik yang dibahas. Adapun teknik-teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data di lapangan, disesuaikan dengan aspek teknis penelitian, adalah sebagai berikut:

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara secara sederhana dapat diartikan sebagai proses tanya jawab antara dua pihak atau lebih, di mana satu pihak berperan sebagai penanya dan pihak lainnya memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Wawancara merupakan salah satu metode penelitian kualitatif yang digunakan untuk memperoleh informasi yang mendalam dari narasumber melalui interaksi langsung. Tujuan wawancara adalah untuk menggali pengalaman, pandangan, opini, serta perasaan narasumber secara lebih terperinci.⁵¹

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan di Masjid Ar Rahman, seperti bendahara, ketua, atau pengurus lainnya. Jenis

⁵⁰ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, 1st ed. (Medan: KBM INDONESIA, 2021).

⁵¹ Miko Nugroho and Eny Kusdarini, “Stratedi Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan,” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2019.

wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara terstruktur. Pertanyaan sudah disiapkan sebelumnya dan sama untuk setiap narasumber. Biasanya dilakukan dalam penelitian yang lebih formal, seperti survei. Kelebihannya adalah hasil yang lebih mudah dibandingkan, tetapi mungkin kurang fleksibel dalam mengeksplorasi jawaban mendalam.

b. Observasi

Observasi merupakan sumber pengetahuan paling dasar bagi manusia, yang berfungsi sebagai alat sistematis dalam ilmu sosial untuk memahami kehidupan sehari-hari sebelum melakukan wawancara atau diskusi kelompok. Dalam pelaksanaan observasi, terdapat dua perspektif utama, yaitu perspektif *outsider* dan *insider*. Perspektif outsider menempatkan peneliti pada posisi yang menjaga jarak dengan objek atau subjek penelitian agar dapat mempertahankan sudut pandang objektifnya. Sebaliknya, perspektif insider menghilangkan jarak tersebut, memungkinkan peneliti untuk berinteraksi langsung dengan objek atau subjek sehingga dapat memahami perspektif mereka secara lebih mendalam.

Dalam penelitian ini, peneliti mengadopsi perspektif *insider* dengan menghilangkan jarak antara peneliti dan objek atau subjek penelitian. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk berinteraksi secara langsung sehingga dapat memahami dan memperoleh perspektif dari subjek secara mendalam. Dengan demikian, metode ini memberikan data yang lebih autentik mengenai penerapan prinsip-prinsip good governance di lapangan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari istilah "dokumen," yang merujuk pada berbagai barang tertulis. Metode dokumentasi melibatkan pemeriksaan berbagai jenis dokumen seperti buku, majalah, peraturan, undang-undang, notulen rapat, catatan harian, dan lain-lain. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak dilakukan secara langsung kepada subjek penelitian, melainkan melalui analisis dokumen. Studi dokumenter adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan serta menganalisis berbagai dokumen, baik dalam bentuk tulisan, gambar, maupun format elektronik.⁵²

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan dokumen-dokumen keuangan masjid, seperti laporan keuangan, bukti transaksi, atau rapat pengurus terkait keuangan. Dokumen ini bisa digunakan untuk menilai sejauh mana akuntabilitas dan transparansi diterapkan.

2) Teknik Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari hasil pengumpulan di lapangan diolah melalui empat tahapan pokok. Dalam hal ini, peneliti menerapkan teknik pengolahan data dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

a. *Editing* (Pemeriksaan Data)

Editing atau pemeriksaan data adalah proses menelaah seluruh data yang telah dikumpulkan, yang fokus pada kelengkapan jawaban, keterbacaan, kejelasan makna, kesesuaian serta keterkaitan data tersebut dengan informasi lain.⁵³ Pada penelitian ini, peneliti melakukan proses

⁵² Sulistyawati, *Penelitian Kualitatif: Metode Penelitian Kualitatif*, Jurnal *EQUILIBRIUM*, 2023.

⁵³ Zuchri dan Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (CV Syakir Media Press, 2021).

editing terhadap hasil wawancara yang dilakukan dengan informan yang memiliki keterkaitan langsung dengan Masjid Ar Rahman Lappa-Lappa.

b. *Classifying* (Klasifikasi)

Classifying merupakan tahapan pengelompokan data yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti hasil wawancara dengan subjek penelitian, observasi langsung, serta pencatatan di lapangan. Seluruh data yang telah dikumpulkan dibaca secara cermat dan dianalisis secara mendalam, kemudian dikelompokkan berdasarkan kesesuaian dan kebutuhan penelitian. Tujuan dari proses ini adalah agar data yang tersedia menjadi lebih terstruktur, mudah dipahami, serta mampu menyajikan informasi secara objektif. Data yang memiliki kesamaan makna atau substansi dikategorikan ke dalam kelompok-kelompok tertentu sesuai dengan hasil wawancara dan referensi yang relevan.

c. *Verifying* (Verifikasi)

Verifying merupakan tahap pengecekan terhadap data dan informasi yang sudah dikumpulkan di lapangan guna memastikan validitas serta keabsahan data sehingga mampu dipertanggungjawabkan pada penelitian. Dalam penelitian ini, proses verifikasi dilakukan terhadap data yang diperoleh dari para informan guna memastikan bahwa data tersebut akurat, dapat dipercaya, dan layak dijadikan dasar dalam analisis ilmiah.

d. *Concluding* (Kesimpulan)

Concluding merupakan tahap penutup pada rangkaian proses pengolahan data, di mana peneliti merumuskan kesimpulan yang berkaitan langsung dengan objek penelitian berdasarkan hasil pengolahan data. Proses

concluding merupakan langkah final setelah melalui empat tahapan sebelumnya, yaitu editing, *classifying*, *verifying*, dan *concluding* itu sendiri.

F. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data merupakan upaya untuk menjamin bahwa data yang dikumpulkan oleh peneliti sesuai dengan kondisi nyata yang terjadi di lapangan, sehingga data yang disajikan memiliki validitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian kualitatif, uji keabsahan data dilakukan melalui beberapa teknik sebagai berikut:

1) Uji *Credibility* (Kepercayaan)

Credibility atau derajat kepercayaan pada penelitian kualitatif merupakan istilah validasi yang menunjukkan bahwa alat ukur yang digunakan serta temuan yang dihasilkan menggambarkan keadaan faktual sesuai dengan kondisi riil objek penelitian.

2) Uji *Transferability* (Keteralihan)

Dalam pendekatan kualitatif, tidak digunakan istilah validasi eksternal sebagaimana dalam penelitian kuantitatif, melainkan menggunakan konsep transferabilitas. Transferabilitas merujuk pada sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan atau dialihkan ke situasi atau konteks lain yang memiliki karakteristik yang serupa.

3) Uji *Confirmability* (Kepastian)

Dalam penelitian kualitatif uji confirmability disebut juga uji obyektifitas penelitian. Penelitian dikatakan obyektif bila hasil penelitian disepakati oleh banyak orang.

4) Uji *Dependability*

Dalam penelitian kualitatif, pengujian *dependability* ini disebut reabilitas.

Uji ini dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian.⁵⁴

G. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif pada umumnya memiliki tingkat kompleksitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan analisis data kuantitatif. Peneliti harus menguasai landasan teori secara mendalam agar interpretasi yang dihasilkan bersifat objektif dan berbasis pada imu pengetahuan. Selain itu, penelitian kualitatif cenderung bersifat dinamis dan dapat berkembang sesuai dengan kondisi di lapangan, sehingga cakupannya dapat menjadi luas dan tumpang tindih. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah tertentu agar fokus penelitian kualitatif tetap terjaga dan tidak melebar ke luar dari masalah utama.

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses merangkum dan menyaring informasi yang relevan dan penting untuk dianalisis atau dijadikan kesimpulan dalam penelitian. Proses ini dapat dilakukan melalui abstraksi, yaitu merangkum inti informasi agar tetap fokus pada tujuan penelitian. Reduksi data dilakukan secara berkelanjutan oleh peneliti selama proses pengumpulan data, sehingga tercipta catatan utama dari hasil penggalian informasi. Dengan kata lain, reduksi bertujuan untuk menyederhanakan data yang diperoleh di lapangan, yang pada dasarnya bersifat kompleks dan seringkali mencampurkan informasi yang tidak relevan dengan tema penelitian.

⁵⁴ Helaludding dan Hengki Wijaya, *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik* (Makassar: Theology Ekonomi Jaffar, 2019).

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses pengorganisasian informasi secara sistematis guna memudahkan penarikan kesimpulan. Tahap ini dilakukan dengan menyusun data secara terstruktur agar gambaran menyeluruh dapat terlihat jelas. Mengingat data kualitatif biasanya berbentuk narasi yang kompleks, penyajian data bertujuan untuk menyederhanakan tanpa mengurangi makna dan esensi informasi. Pada proses ini, peneliti mengelompokkan dan menyajikan data berdasarkan pokok-pokok permasalahan yang telah ditetapkan, sehingga mempermudah analisis dan interpretasi.

3. Kesimpulan atau verifikasi

Kesimpulan atau verifikasi merupakan tahapan akhir dalam proses analisis data pada penelitian kualitatif. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan membandingkan kesesuaian antara pernyataan yang diperoleh dari objek penelitian dengan makna yang terkandung dalam konsep-konsep dasar yang digunakan dalam penelitian tersebut.⁵⁵

⁵⁵ Sahir, *Metodologi Penelitian*.

BAB IV **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Masjid Ar – Rahman Lappa-Lappae, Kecamatan Suppa, sebagai sasaran penelitian, penelitian dilakukan dengan beberapa tahapan diantaranya yaitu tahapan pengamatan (observasi), tahapan pengamatan tersebut dilakukan dengan mengamati seluruh aspek yang terkait dengan *good governance* pada masjid Ar - Rahman Lappa - Lappae yakni Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi. Yang kedua tahapan wawancara, peneliti melakukan wawancara kepada beberapa narasumber yang mengetahui secara jelas terkait dengan penerapan prinsip *Good governance* pada pengelolaan keuangan Masjid Ar-Rahman. Narasumber pada penelitian ini yaitu Pak Lurah yang juga sebagai Sekretaris pada Masjid Ar-Rahman, serta 4 Jamaah Masjid Ar-Rahman yang merupakan warga Desa Lappa-Lappae Kecamatan Suppa. Tahapan terakhir yakni dokumentasi. Hasil penelitian dijelaskan merujuk pada rumusan masalah berikut:

1. Penerapan Prinsip *Good governance* Pada Pengelolaan Keuangan Masjid Ar - Rahman Lappa-Lappae Kecamatan Suppa

Hasil penelitian merujuk pada rumusan masalah pertama yang berkaitan dengan penerapan prinsip *good governance* pada pengelolaan keuangan Masjid Ar-Rahman Lappa-Lappae Kecamatan Suppa. Bagaimana penerapan prinsip *good governance* pada pengelolaan keuangan Masjid Ar-Rahman Lappa-Lappae Kecamatan Suppa, berikut hasil wawancara dari sekretaris Masjid:

“Iya, Jadi begini dek kalau masalah transparansi di Masjid Ar-Rahman itu Transparan, setiap hari jumat diumumkan keadaan keuangan. Bawa saldo kas sekian, pemasukan sekian dan

*pengeluaran sekian. Kemudian kalau masalah sumbangan, sumbangan itu dari masyarakat artinya dari jamaah. Untuk akuntabilitas atau pertanggung jawabannya itu kita buat pencatatan terhadap setiap transaksi tetapi memang masih sederhana, belum sampai dibuat laporan keuangan yang lengkap dan rinci. Terkait masalah partisipasi, Jamaah biasanya diajak gotong royong kalau ada kegiatan, seperti bersih-bersih masjid atau acara tertentu. Kalau ada keperluan dana juga biasanya diumumkan, jadi jamaah bisa ikut membantu. Memang partisipasinya masih lebih banyak di kegiatan fisik atau sumbangan”.*⁵⁶

Hasil wawancara menyebutkan bahwa *Good governance* sudah diimplementasikan pada masjid Ar – Rahman, untuk Transparansi sendiri perwujudannya itu dengan mengumumkan setiap hari jumat saldo kas yang masuk dan juga keluar. Untuk Akuntabilitas atau pertanggungjawaban sudah dilakukan dengan membuat seluruh catatan atas transaksi yang telah terjadi. Namun, diketahui bahwa pencatatan yang dilakukan masih sangat sederhana, belum sesuai dengan standar Akuntansi Masjid yang ada. Sedangkan untuk partisipasinya, masyarakat diikutkan berpartisipasi setiap ada kegiatan ataupun terkait dengan keuangan di masjid.

Lantas Siapa saja yang terlibat dalam pengelolaan keuangan pada masjid Ar-Rahman, Pak suardi menjelaskan bahwa:

*“Kalau struktur organisasi di masjid itu cuman ada 3 yakni ketua panitia, sekertaris dan juga bendahara. Kalau ketuanya itu Pak Subhan Majid, Sekertarisnya saya dan bendaharanya Hj Kartini. Kalau pengelolaan keuangan itu seluruh panitia terlibat. Jadi kalau misalnya kita mau membangun kita adakan rapat dengan jamaah. Nanti setelah kita adakan rapat dengan jamaah akan diputuskan disitu untuk membangun dan membeli keperluan masjid. Kalau rapat jamaah biasanya diumumkan saja kepada jamaah bahwa silahkanki tinggal akan ada rapat”.*⁵⁷

⁵⁶ Suardi, Suaib, Sekertaris, Wawancara Masjid Ar-Rahman Lappa-Lappae Kecamatan Suppa, 2 Mei 2025.

⁵⁷ Suardi, Suaib, Sekertaris, Wawancara Masjid Ar-Rahman Lappa-Lappae Kecamatan Suppa, 2 Mei 2025.

Hal serupa juga dijelaskan oleh informan lain :

*“Iya, yang mengurus segala keperluan Masjid itu adalah Pak Lurah, istilahnya dia yang menjadi panitia pimpinan di Masjid. Tapi bukan dia yang menjadi bendahara melainkan Ibu Hj.Kartini, yang memegang keuangan masjid. Sedangkan yang biasanya mengumumkan dana Masjid itu pak lurah”.*⁵⁸

Dari penjelasan tersebut diketahui bahwa dalam masjid Ar-Rahman itu struktur organisasinya terdiri atas 3 wewenang yakni ketua, sekertaris dan juga bendahara. Namun menurut beberapa narasumber ternyata tugas bendahara itu hanya memegang uang masjid saja, sementara yang mengelola keuangan masjid, serta mencatat segala pengeeluaran dan pemasukan masjid itu ialah pak lurah selaku sekertaris di Masjid Ar-Rahman.

Setelah membahas tentang tugas dan peran pengurus masjid, salah satu hal menarik yang penting untuk diketahui adalah Apakah ada dokumentasi tertulis seperti laporan keuangan yang dapat diakses oleh pihak tertentu dan Bagaimana proses pencatatan dan pelaporan keuangan dilakukan:

*“Kalau untuk laporan keuangan itu tidak ada, tetapi yang dibuat itu hanya transaksi terkait saldo kas yakni pemasukan dan pengeluaran saja, kan masjid itu untuk orang banyak berbeda dengan perusahaan”.*⁵⁹

Berdasarkan wawancara diatas, diketahui bahwa pada masjid Ar-Rahman bentuk pencatatannya itu masih sederhana, belum sampai pada tahapan pembuatan laporan keuangan yang terperinci. Meskipun pembuatan laporan keuangan di masjid masih dilakukan secara sederhana dan belum disusun secara rinci, hal ini tetap menarik untuk diperhatikan lebih lanjut. Penting untuk mengetahui apakah pencatatan yang ada sudah disampaikan secara jelas dan

⁵⁸ Uni, Jamaah Masjid Ar-Rahman, Wawancara Masjid Ar-Rahman Lappa-Lappae Kecamatan Suppa, 5 Mei 2025.

⁵⁹ Suardi, Suaib, Sekertaris, Wawancara Masjid Ar-Rahman Lappa-Lappae Kecamatan Suppa, 2 Mei 2025.

mudah dipahami oleh jamaah. Selain itu, perlu juga dipahami bagaimana biasanya informasi terkait penggunaan dana masjid disampaikan kepada jamaah, apakah melalui papan pengumuman, rapat, atau cara lainnya, berikut penjelasan dari beberapa informan yang merupakan jamaah masjid:

*“Lumayan mudah dimengerti, kemudian umumnya informasi keuangan disampaikan pengurus pada hari jumat. Mereka selalu bilang sumber dana dan penggunaannya, namun untuk pencatatannya, setahu saya hanya dilakukan pencatatan sederhana seperti saldo masuk dan keluar saja, belum sampai pada tahapan laporan keuangan yang dijelaskan secara rinci. Kalau menurut saya sendiri pencatatan sederhana sudah cukup untuk kegiatan harian. Tetapi saya juga mendukung pembuatan laporan keuangan resmi, apalagi kalau masjid nanti mau skala kegiatan lebih besar. supaya akuntabilitasnya makin kuat dan bisa dipertanggungjawabkan secara tertulis”*⁶⁰

Adapun Menurut informan lain yaitu sebagai berikut:

*“Jelas, dananya itu biasanya disebut saja bahwa sekian jumlahnya biasanya diumumkan pada hari jumat. Disana ada papannya tapi tidak pernah tertulis”*⁶¹.

Dengan demikian, diketahui bahwa pada masjid Ar – Rahman dapat dikatakan transparan, namun belum terlalu optimal pencatatannya masih bisa diperbaiki, menggunakan sarana dan prasarana yang ada, hingga dapat memudahkan jamaah untuk mengetahui informasi terkait keadaan atau perkembangan keuangan di masjid. Selain transparansi, partisipasi jamaah juga penting dalam pengelolaan dana masjid. Hal ini mencakup keterlibatan mereka dalam rapat atau musyawarah serta kesempatan untuk memberikan masukan terkait penggunaan dana masjid. Berikut pernyataan informan terkait apakah jamaah diberikan kesempatan untuk memberikan masukan atau saran terkait penggunaan dana masjid sbb:

⁶⁰ Afika Izati, Jamaah Masjid Ar-Rahman Lappa-Lappae, Wawancara Masjid Ar-Rahman Lappa-Lappae Kecamatan Suppa, 26 April 2025

⁶¹ Ibu Kartini, Jamaah Masjid Ar-Rahman Lappa-Lappae, Wawancara Masjid Ar-Rahman Lappa-Lappae Kecamatan Suppa, 3 Mei 2025.

*“Terkait musyawarah semua orang dilibatkan, biasanya ketika akan ada rapat, diumumkan setelah shalat. jadi yang mau tinggal bisa tinggal dulu untuk mengikuti rapat, kemudian jamaah dipersilahkan untuk meberikan masukan terkait hal-hal yang dibutuhkan untuk keperluan masjid”.*⁶²

Dan terkait masukan dari jamaah apakah diperhatikan dan diterapkan dalam kebijakan masjid menurut saudari uni sbb:

*“Ya, masukan dari jamaah itu diterapkan. Pernah ada jamaah yang protes soal kipasnya yang rusak dan langsung diperbaiki.”*⁶³

Dari kutipan diatas diketahui bahwa pengurus masjid menghargai masukan dari jamaah dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dengan melibatkan jamaah dalam musyawarah dan menanggapi masukan mereka. Dengan demikian, komunikasi yang terbuka dan tindakan yang responsif dari pengurus masjid terhadap masukan jamaah dapat memperkuat kepercayaan dan meningkatkan keterlibatan komunitas dalam memakmurkan masjid.

2. Kendala Penerapan Good Governance Pada Pengelolaan Keuangan Masjid Ar Rahman Lappa-Lappae Kecamatan Suppa

Penelitian yang dilakukan di Masjid Ar Rahman Lappa-Lappae Kecamatan Suppa mengidentifikasi Apa yang menjadi kendala dalam penerapan *good governance* pada pengelolaan keuangan masjid. Menurut Pak Suardi selaku sekrtaris masjid sbb:

“Alhamdulillah sampai sekarang tidak ada kendala yang serius dalam menerapkan prinsip-prinsip itu. Karena kami tiap minggu rutin kasih info, mulai dari kondisi kas sederhana sampai rencana

⁶²Anto, Jamaah Masjid Ar-Rahman Lappa-Lappae, Wawancara Masjid Ar-Rahman Lappa-Lappae Kecamatan Suppa, 24 April 2025.

⁶³ Uni, Jamaah Masjid Ar-Rahman Lappa-Lappae, Wawancara Masjid Ar-Rahman Lappa-Lappae Kecamatan Suppa, 5 Mei 2025.

beli kebutuhan masjid. jadi jamaah paham dan tidak ada masalah – masalah yang muncul.”⁶⁴

Hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa dengan komunikasi yang rutin antara pengurus masjid dan jamaah, seperti penyampaian informasi mingguan mengenai kondisi keuangan dan rencana kebutuhan masjid berperan penting untuk mencegah munculnya masalah dalam pengelolaan masjid.

Adapun menurut informan yakni jamaah Masjid Ar-Rahman ada beberapa hal yang perlu dioptimalkan oleh pengurus masjid yang sangat penting untuk kepentingan jamaah dan keberlangsungan di Masjid Ar Rahman Lappa-Lappae sbb:

“Kalau saya yang perlu dioptimalkan itu transparansinya, kan sudah ada papannya toh, bisa dicatat semua pengeluaran dan pemasukan di masjid di papan itu, supaya semua jamaah bisa tahu keuangan di Masjid.”⁶⁵

Hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa perlu adanya pengoptimalan dari pengurus masjid terkait papan pengumuman yang ada di masjid, sebaiknya masjid menggunakan sarana yang ada sesuai untuk peruntukannya, sehingga jamaah bisa mengetahui kondisi keuangan pada masjid.

Ada juga pendapat dari informan lain yaitu sbb:

“Saya melihat yang paling perlu dioptimalkan adalah sistem pencatatan keuangan yang sekarang masih sederhana, agar dibuat lebih rapi dan sesuai dengan standar akuntansi masjid, sehingga kami bisa lebih mengetahui terkait perkembangan di masjid.”⁶⁶

⁶⁴ Suardi, Suaib, Sekertaris, Wawancara Masjid Ar-Rahman Lappa-Lappae Kecamatan Suppa, 2 Mei 2025.

⁶⁵ Anto, Jamaah Masjid Ar-Rahman Lappa-Lappae, Wawancara Masjid Ar-Rahman Lappa-Lappae Kecamatan Suppa, 24 April 2025.

⁶⁶ Afika Izati, Jamaah Masjid Ar-Rahman Lappa-Lappae, Wawancara Masjid Ar-Rahman Lappa-Lappae Kecamatan Suppa, 26 April 2025

Dari hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa pengurus masjid perlu mengoptimalkan adanya pencatatan keuangan yang lebih rapi dan sesuai dengan standar akuntansi untuk organisasi nirlaba seperti PSAK 45. Hal ini penting untuk memantau perkembangan keuangan masjid secara lebih efektif dan transparan. Dengan meningkatkan sistem pencatatan keuangan , pengelolaan masjid menjadi lebih transparan, akuntabel, dan inklusif, serta mampu memenuhi kebutuhan seluruh lapisan jamaah.

Adapun pendapat sekretaris masjid terkait rekomendasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan masjid yakni sbb:

“Kalau masjid, masjid itu adalah miliknya masyarakat, tidak sama dengan organisasi-organisasi lain. kalau masjid itu tidak perlu ada seperti laporan laporan perusahaan. yang jelas, kita melaksanakan kegiatan-kegiatan di masjid, kita libatkan jamaah. Karena masjid itu tidak fleksibel tidak sama dengan organisasi-organisasi lainnya. Karena masjid itu dananya dari masyarakat dan kita sudah libatkan masyarakat dalam hal pengambilan keputusan untuk apa yang mau kita belanjakan, jadi tidak pernah ada kendala selama ini.”⁶⁷

Hasil dari wawancara tersebut mnejelaskan bahwa masjid sebagai milik bersama masyarakat tidak memerlukan laporan keuangan seperti perusahaan. Pengurus masjid fokus pada pelaksanaan kegiatan yang melibatkan jamaah dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan dana masjid, sehingga tidak ada kendala dalam operasionalnya.

B. Pembahasan

1. Penerapan Prinsip *Good governance* Pada Pengelolaan Keuangan Masjid

Ar - Rahman Lappa-Lappae Kecamatan Suppa

Good governance adalah konsep tata kelola yang menekankan pada manajemen yang bertanggung jawab, transparan, dan efisien, sesuai dengan

⁶⁷ Suardi, Suaib, Sekertaris, Wawancara Masjid Ar-Rahman Lappa-Lappae Kecamatan Suppa, 2 Mei 2025.

prinsip-prinsip demokrasi dan akuntabilitas. Dalam organisasi nirlaba, penerapan *Good governance* sangat penting untuk memastikan pengelolaan yang terstruktur dan terkendali sehingga dapat mencapai tujuan sosial atau kemasyarakatan tanpa berorientasi pada keuntungan. Dengan pengelolaan yang baik, organisasi nirlaba mampu menciptakan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Menurut Adrian Sutedi, Prinsip-Prinsip *Good governance* meliputi : Participation (Partisipasi) Transparency (Transparansi), dan Accountability (Akuntabilitas).

Adapun tujuan dari adanya tata kelola dalam organisasi nirlaba yaitu sebagai berikut:

1. Menghindari adanya kecurangan
2. Untuk memudahkan dalam proses pengelolaan
3. Meningkatkan partisipasi anggota dalam sebuah entitas
4. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi
5. Meningkatkan transparansi

Dengan demikian, dengan adanya tata kelola yang baik dalam organisasi nirlaba, diharapkan segala tujuan yang ditetapkan oleh organisasi dapat terorganisir dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa, Masjid Ar-Rahman telah mengimplementasikan prinsip-prinsip *Good Governance*, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Namun, untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan masjid, diperlukan beberapa langkah perbaikan agar sesuai dengan standar yang berlaku. Dalam aspek transparansi, pengumuman jumlah saldo kas masuk dan keluar yang diumumkan setiap hari jumat, merupakan salah satu upaya untuk bersikap terbuka kepada jamaah. Namun, untuk meningkatkan

transparansi, informasi yang disampaikan sebaiknya mencakup rincian transaksi dan disajikan dalam format laporan keuangan yang standar.

Dalam aspek akuntabilitas, pencatatan transaksi keuangan menunjukkan adanya pertanggungjawaban. Namun, pencatatan yang dilakukan masih bersifat sederhana dan belum memenuhi standar akuntansi yang berlaku, seperti PSAK 45, menunjukkan perlu adanya peningkatan dalam hal ini. PSAK 45 mengharuskan penyusunan laporan keuangan yang mencakup laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Dengan mengadopsi standar ini, masjid dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangannya.

Sedangkan dalam aspek partisipasi, keterlibatan masyarakat dalam kegiatan dan pengelolaan keuangan masjid menunjukkan adanya partisipasi aktif. Hal ini sejalan dengan prinsip *Good Governance* yang mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Namun, untuk meningkatkan partisipasi, masjid dapat membentuk forum musyawarah jamaah untuk membahas rencana kegiatan dan anggaran masjid, serta melibatkan perwakilan jamaah dalam proses audit internal atau evaluasi keuangan. Dengan melakukan perbaikan-perbaikan tersebut, Masjid Ar-Rahman dapat meningkatkan kualitas tata kelola keuangannya sesuai dengan prinsip *Good Governance* dan standar akuntansi yang berlaku.

Dalam struktur organisasi masjid, pengelolaan keuangan dan administrasi merupakan elemen yang sangat penting. Pengelolaan keuangan yang baik menunjukkan bahwa pengurus masjid merupakan individu yang

bertanggungjawab dan amanah. Sebaliknya jika pengelolaan keuangan buruk maka akan menimbulkan persepsi negative di kalangan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, diketahui bahwa pada masjid Ar-Rahman itu struktur organisasinya terdiri atas 3 wewenang yakni ketua, skertaris dan juga bendahara. Namun menurut beberapa narasumber ternyata tugas bendahara itu hanya memegang uang masjid saja, sementara yang mengelola keuangan masjid, serta mencatat segala pengeluaran dan pemasukan masjid itu ialah sekretaris. berdasarkan wawancara tersebut, terdapat ketidaksesuaian daam pembagian tugas dimana bendaahara hanya memegang uang saja. Sementara sekretaris yang mengelola dan mencatat segala pengeluaran serta pemasukan keuangan masjid.

Dalam praktik umum organisasi masjid, bendahara memiliki tanggung jawab utama dalam pengelolaan keuangan. Tugas bendahara mencakup menerima, menyimpan, mencatat, dan melaporkan seluruh transaksi keuangan masjid. Hal ini sesuai dengan pedoman yang menyatakan bahwa bendahara bertugas mencatat keluar masuk keuangan lembaga masjid, baik dari infaq, sedekah, maupun bantuan, serta rutin membuat laporan pemasukan dan pengeluaran masjid setiap Jumat pada papan pengumuman. Sementara itu, sekretaris bertanggung jawab terhadap administrasi kesekretariatan pengurus masjid, termasuk pengarsipan file-file, data-data kegiatan dari seluruh program kerja, serta membuat dan mendistribusikan undangan. Dengan demikian, pembagian tugas di Masjid Ar-Rahman yang menempatkan pengelolaan keuangan pada sekretaris tidak sesuai dengan struktur organisasi masjid pada umumnya. Untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas, disarankan agar

tugas pengelolaan keuangan dialihkan kepada bendahara sesuai dengan peran dan tanggung jawab yang lazim dalam organisasi masjid.

2. Kendala Penerapan Good Governance Pada Pengelolaan Keuangan Masjid Ar Rahman Lappa-Lappae Kecamatan Suppa

Organisasi nirlaba seperti masjid seringkali dihadapi berbagai kendala yang cukup kompleks, karena meskipun tidak berorientasi pada keuntungan, namun organisasi nirlaba juga dituntut agar akuntabel, transparan dan bekerja secara efisien. Adapun beberapa kendala yang biasanya dihadapi oleh Organisasi nirlaba sebagai berikut:

1) Kurangnya Sumber Daya Manusia Profesional

Banyak organisasi nirlaba mengandalkan relawan atau tenaga kerja dengan keterbatasan keahlian manajerial, keuangan, dan administrasi.

2) Minimnya Dana Operasional

Sumber pendanaan bergantung pada donatur, hibah, atau sumbangan, yang sifatnya tidak tetap. Serta Alokasi dana seringkali hanya fokus pada program kegiatan, sementara kebutuhan operasional tidak tercukupi.

3) Keterbatasan dalam Transparansi dan Akuntabilitas

Tidak semua organisasi memiliki sistem pelaporan keuangan dan dokumentasi yang memadai.

Merujuk pada teori diatas, dan berdasarkan dengan temuan hasil wawancara yang dilakukan oleh pak Suardi selaku sekretaris pada Masjid Ar-Rahman Lappa-Lappae menunjukkan bahwa tidak semua organisasi nirlaba mengalami hambatan tersebut. Dalam praktiknya, pengelolaan keuangan masjid telah berjalan dengan baik, terutama dalam hal transparansi dan akuntabilitas.

Pak Suardi menjelaskan bahwa pengurus secara rutin memberikan informasi kepada jamaah setiap hari Jumat terkait kondisi keuangan dan juga rencana yang ingin diselenggarakan oleh panitia Masjid. Informasi tersebut diakukan secara sederhana namun konsisten. Dengan adanya hal tersebut dapat mencegah adanya masalah, kecurigaan atau ketidakpercayaan dari jamaah sebagai pemangku kepentingan yang utama.

Adapun beberapa temuan hasil wawancara dengaan jamaah Masjid Ar Rahman menyatakan bahwa ada perbedaan pendapat antar informan terkait penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Masjid Ar Rahman Lappa-Lappae, yang menunjukkan adanya berbagai persepsi terhadap standar tata kelola yang ideal. Sebagian informan menyatakan bahwa tidak terdapat kendala serius karena pengurus masjid telah secara rutin menyampaikan informasi keuangan kepada jamaah, seperti laporan kas mingguan dan rencana pembelian kebutuhan masjid. Praktik ini menunjukkan adanya keterbukaan informasi yang mencerminkan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas secara sederhana. Namun demikian, informan lain juga berpendapat bahwa sistem pencatatan keuangan masih perlu dioptimalkan agar lebih rapi dan sesuai dengan standar akuntansi untuk organisasi nirlaba, seperti PSAK 45. Menurutnya, sistem pencatatan yang baik akan mempermudah pemantauan perkembangan keuangan masjid secara lebih terstruktur dan profesional.

Perbedaan pandangan ini mencerminkan bahwa meskipun pengurus telah menjalankan praktik transparansi, belum semua pihak merasa bahwa kualitas pencatatan dan pelaporan telah memenuhi standar ideal. Hal ini selaras dengan kendala umum yang dihadapi organisasi nirlaba, yaitu keterbatasan dalam sistem

pelaporan keuangan dan dokumentasi yang memadai. Oleh karena itu, optimalisasi tidak hanya mencakup aspek komunikasi informasi, tetapi juga peningkatan sistem administrasi dan pencatatan keuangan agar lebih formal, tertib, dan mudah dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, pengelolaan masjid akan semakin mencerminkan prinsip-prinsip *good governance* yang utuh, meliputi transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efisiensi, serta menjawab kebutuhan dan ekspektasi seluruh lapisan jamaah.

Sistem pencatatan keuangan yang baik tidak hanya memudahkan dalam pemantauan arus kas dan perkembangan kegiatan masjid, tetapi juga dapat meningkatkan kepercayaan jamaah sebagai pemangku kepentingan utama. Kelemahan dalam dokumentasi dan pelaporan, sebagaimana disebutkan dalam teori mengenai kendala organisasi nirlaba, dapat berdampak pada rendahnya partisipasi jamaah dan potensi munculnya kecurigaan terhadap pengelolaan dana. Oleh karena itu, meningkatkan kualitas pencatatan keuangan menjadi langkah strategis dalam memperkuat prinsip *good governance*, khususnya pada aspek akuntabilitas dan transparansi.

Dengan penerapan sistem pencatatan yang lebih baik dan mengacu pada standar yang berlaku, masjid tidak hanya menjalankan fungsinya sebagai lembaga ibadah, tetapi juga sebagai entitas nirlaba yang mampu mengelola sumber daya secara profesional dan bertanggung jawab kepada publik. Optimalisasi ini juga dapat membuka peluang untuk pengembangan program-program masjid secara lebih terstruktur dan berkelanjutan.

Hasil temuan pada Masjid Ar-Rahman juga menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman SDM terkait *Good Governance* yang semestinya pada organisasi nirlaba

seperti Masjid. Hasil wawancara tersebut memberikan perspektif yang cukup berbeda jika dibandingkan dengan teori kendala pengelolaan organisasi nirlaba, khususnya terkait transparansi, akuntabilitas, dan pencatatan keuangan yang rapi. Menurut pendapat sekretaris masjid menegaskan bahwa pengelolaan masjid bersifat unik karena masjid adalah milik bersama masyarakat dan berbeda dengan organisasi atau perusahaan pada umumnya. Oleh karena itu, menurutnya, masjid tidak perlu memiliki laporan keuangan yang baku seperti perusahaan. Fokus pengelolaan lebih kepada pelibatan jamaah dalam pengambilan keputusan penggunaan dana dan pelaksanaan kegiatan, sehingga transparansi dan akuntabilitas dianggap tercapai melalui mekanisme partisipasi tersebut.

Secara teori, pendekatan ini bisa dipahami sebagai bentuk implementasi prinsip partisipasi dan transparansi secara informal, yang memang sesuai dengan karakteristik organisasi nirlaba berbasis komunitas. Namun, dari sudut pandang tata kelola modern dan standar *good governance*, meskipun pelibatan jamaah sangat penting, pencatatan keuangan yang rapi dan sistematis tetap diperlukan agar pengelolaan dana dapat dipertanggungjawabkan secara formal dan terukur. Hal ini juga membantu menghindari potensi penyalahgunaan dana serta meningkatkan kepercayaan jamaah secara lebih luas.

Singkatnya, hasil wawancara ini sesuai dengan prinsip partisipasi dalam teori organisasi nirlaba, tetapi belum sepenuhnya memenuhi aspek transparansi dan akuntabilitas formal yang dianjurkan dalam praktik *good governance* pada organisasi nirlaba. Oleh karena itu, meskipun pengelolaan masjid berjalan lancar tanpa kendala serius, peningkatan sistem pencatatan dan pelaporan keuangan yang lebih terstruktur tetap diperlukan untuk memperkuat tata kelola keuangan masjid.

Dengan demikian, berdasarkan dengan teori tersebut, adapun hal yang masih menjadi kendala pada Masjid Ar Rahman Lappa-Lappae, yakni terkait transparansi dan akuntabilitas yang belum optimal atau tidak sesuai dengan standar akuntansi pada organisasi nirlaba, kemudian pemahaman SDM yang kurang, terkait tata kelola yang baik pada organisasi nirlaba.



BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Good governance adalah konsep tata kelola yang menekankan pada manajemen yang bertanggung jawab, transparan, dan efisien, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan akuntabilitas. Dalam organisasi nirlaba, penerapan *Good governance* sangat penting untuk memastikan pengelolaan yang terstruktur dan terkendali sehingga dapat mencapai tujuan sosial atau kemasyarakatan tanpa berorientasi pada keuntungan. Dengan pengelolaan yang baik, organisasi nirlaba mampu menciptakan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Menurut Adrian Sutedi, Prinsip-Prinsip *Good governance* meliputi : *Participation* (Partisipasi) *Transparancy* (Transparansi), dan *Accountability* (Akuntabilitas).

Pada Masjid Ar-Rahman Lappa-Lappae telah mengimplementasikan prinsip-prinsip *good governance* seperti transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Dalam aspek transparansi, pengumuman jumlah saldo kas masuk dan keluar yang diumumkan setiap hari jumat, merupakan salah satu upaya untuk bersikap terbuka kepada jamaah. Namun, untuk meningkatkan transparansi, informasi yang disampaikan sebaiknya mencakup rincian transaksi dan disajikan dalam format laporan keuangan yang standar. Dalam aspek akuntabilitas, pencatatan transaksi keuangan menunjukkan adanya pertanggungjawaban. Namun, pencatatan yang masih sederhana dan belum sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, seperti PSAK 45, menunjukkan perlu adanya peningkatan dalam hal ini.

Sedangkan dalam aspek partisipasi, keterlibatan masyarakat dalam kegiatan dan pengelolaan keuangan masjid menunjukkan adanya partisipasi aktif. Hal

ini sejalan dengan prinsip *Good Governance* yang mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengawasan.

Adapun kendala dalam penerapan *good governance* yang dialami pada Masjid Ar- Rahman Lappa-Lappae ialah terkait transparansi dan akuntabilitas. Meskipun pengurus telah menjalankan praktik transparansi, dengan mengumumkan kondisi keuangan setiap hari jumat. Namun, hal tersebut merupakan kendala umum yang dihadapi organisasi nirlaba, yaitu keterbatasan dalam sistem pelaporan keuangan dan dokumentasi yang memadai. Oleh karena itu, optimalisasi tidak hanya mencakup aspek komunikasi informasi, tetapi juga peningkatan sistem administrasi dan pencatatan keuangan agar lebih formal, tertib, dan mudah dipertanggungjawabkan. Hasil temuan pada Masjid Ar-Rahman juga menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman SDM terkait *Good Governance* yang semestinya pada organisasi nirlaba seperti Masjid. Hasil wawancara tersebut memberikan perspektif yang cukup berbeda jika dibandingkan dengan teori kendala pengelolaan organisasi nirlaba, khususnya terkait transparansi, akuntabilitas, dan pencatatan keuangan yang rapi.

Dengan demikian, berdasarkan dengan teori tersebut, adapun hal yang masih menjadi kendala pada Masjid Ar Rahman Lappa-Lappae, yakni terkait transparansi dan akuntabilitas yang belum optimal atau tidak sesuai dengan standar akuntansi pada organisasi nirlaba, kemudian pemahaman SDM yang kurang, terkait tata kelola yang baik pada organisasi nirlaba.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pengurus Masjid Ar-Rahman Lappa-Lappae diharapkan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan masjid. Hal ini dapat dilakukan dengan menyusun dan menyampaikan laporan keuangan secara berkala kepada jamaah. Penggunaan media komunikasi seperti papan pengumuman, buletin masjid, atau grup WhatsApp dapat membantu dalam membagikan informasi keuangan secara efektif. Selain itu, pengurus masjid perlu menerapkan standar akuntansi yang berlaku untuk organisasi nirlaba, seperti Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45, dalam penyusunan laporan keuangan. Pelatihan bagi pengurus terkait penerapan standar akuntansi tersebut juga penting untuk memastikan pemahaman yang baik.
2. Penelitian selanjutnya dapat melakukan studi komparatif antara Masjid Ar Rahman Lappa-Lappae dengan masjid lain di wilayah Pinrang atau daerah lain yang memiliki karakteristik serupa. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi praktik terbaik (*best practices*) dalam penerapan prinsip-prinsip *good governance*, serta memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kendala dalam implementasinya.
3. Bagi Pemerintah diharapkan dapat mendorong penguatan tata kelola masjid melalui penyusunan regulasi, pemberian pelatihan, pendampingan, serta penyediaan sistem pelaporan yang sederhana dan efektif. Dengan dukungan dari pemerintah, diharapkan masjid-masjid di Indonesia dapat menjadi contoh lembaga keagamaan yang dikelola secara modern namun tetap berlandaskan nilai-nilai Islam, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan masyarakat yang berintegritas dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul halim, dan Muhammad Syam Kusufi. *Akuntansi Sektor Publik Dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan, Dari Pemerintah Hingga Tempat Ibadah*. Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2012.
- Abrar, Maulana Fauzi. "Akuntabilitas Dan Transparaansi Pelaporan Keuangan Masjid (Studi Empiris : Masjid JAMI' Di Kota Banda Aceh)," 2020.
- Adrian Sutedi. *Good Corporate Governance*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Al-atqiyah. "Penerapan Isak No.35 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba Pada Masjid Besar Al-Atqiyah Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa," 2021.
- "Al-Quran Kementerian Agama RI, Alquran Dan Terjemahannya, Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2020," n.d.
- Arisdha Khairun Nisa. "Penerapan Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Laporan Keuangan Dalam Mengelola Organisasi Nirlaba (Studi Kasus Masjid Agung Al-Umaraini Dan Partai Keadilan Sejahtera)." Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017.
- Bastian, Indra. *Akuntansi Untuk LSM Dan Partai Politik*. Jakarta: ERLANGGA, 2007.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Edisi keem. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Fatimah, Fatimah, and Indrayani Indrayani. "PENERAPAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH SEBAGAI PROSES AKUNTABILITAS PUBLIK (Studi Kasus Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Sidenreng Rappang)." *Economos : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 2, no. 2 (2019): 37. <https://doi.org/10.31850/economos.v2i2.520>.
- Firdaus dan Fakhry Zamzam. "Aplikasi Metodologi Penelitian." Deepublish, 2018.
- Halim, Abdul. *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Ke-3. Jakarta: Salemba Empat, 2008.
- Haryoko, Sapto, Bahartiar, and Fajar Arwadi. *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis)*. Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, 2020.
- Helaludding dan Hengki Wijaya. *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik*. Makassar: Theology Ekonomi Jaffar, 2019.
- Husain, Saddan. "Profit Accountability in Small and Medium Enterprises : An Islamic Accounting Perspective" 8, no. 1 (2025): 1–11.
- Imamah Afiatunnisa. *Implementasi Prinsip Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Dana Zakat, Infaq Dan Shadaqah (ZIS) Di Baitul Maal Bahtera Pekalongan*. Pekalongan: STAIN Pekalongan, 2016.
- Irma Sunarty Purba dan Djanius Djamin. "Partisipasi Masyarakat Dalam Meningkatkan Good Governance Di Tingkat Desa." *Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA*, 2015.
- Ismail. *Tata Kelola Keuangan Masjid Taqwa Muhammadiyah Dan Masjid Agung Di Kabupaten Enrekang*. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2023.
- Kooiman, J. *Governing as Governance*. SAGE Publications, 2003.
- Mahardika , M.,Prasetyo,A., Dan Amalia, F.A. "Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Masjid." *El Muhasaba Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 2022.
- Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI, 2009.

- Meinarti, Suci, and S Masnawaty. "Analisis Implementasi Good Governance Terhadap Pengelolaan Keuangan Organisasi Nirlaba Pada Yayasan Pendidikan Rezki Prasetya Makassar," 2024.
- Melli Dwi Agusti. *Akuntansi Organisasi Nirlaba*. SADA KURNIA PUSTAKA, 2023.
- Muhammadiah. "Partisipasi Publik Sebagai Strategi Mewujudkan Good Governance Otonomi Daerah." *Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA*, 2013.
- Mulyadi. *Implementasi Kebijakan*. Jakarta: Balai Pustaka, 2015.
- Nugroho, Miko, and Eny Kusdarini. "Stratedi Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2019.
- Nur Akbar. *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Masjid Nurul Amin Samata Berdasarkan PSAK 45*. Makassar: UIN ALAUDDIN MAKASSAR, 2022.
- Nurfaisyah, A dan Herawati. "Penyusunan Laporan Keuangan Pada Organisasi Keagamaan Berdasarkan ISAK No.35 (Studi Kasus Masjid Agung Jami Singaraja)," 2022.
- Nurjannah, N. "Akuntabilitas Dan Pengelolaan Keuangan Masjid: PSAK No. 45 Tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba." Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018.
- Pepie Diptyana. "Pelatihan Pencatatan KeuanganDengan Identifikasi Aktivitas Untuk Penganggaran Masjid." Surabaya: STIE Perbanas Surabaya, 2009.
- Prasetyo, J.E. "Kajian Teoritis Akuntabilitas". Vol. 1. Tazkiyatun Nafs, 2017.
- Qaed, Issa, Elvan Syaputra, Faridl Noor Hilal, Muhammad Febriansyah, Muhammad Majdy Amiruddin, Muhammad Ridhwan, and Ab Aziz. "Maslahah as an Islamic Source and Its Application in Financial Transactions." *Journal of Research in Humanities and Social Science* 2, no. 5 (2014): 66–71.
- Rahmi. *Akuntabilitas Dan Transparansi Keuangan Masjid Dalam Perspektif Islam*. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018.
- Rismala, Muslimin, Amin Asbi. *Akuntansi Sosial: Integrasi Etika Dan Keberlanjutan Yang Bertanggung Jawab*. Edited by Kurnia Perdana. Malang: Pustaka Peradaban, 2025.
- Ritonga, Irwan Taufiq. *Akuntansi Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM, 2010.
- Sahir, Syafrida Hafni. *Metodologi Penelitian*. 1st ed. Medan: KBM INDONESIA, 2021.
- Setiawan, Nanang. "Urgensi Pengelolaan Keuangan Masjid Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Dan Pencegahan Terhadap Fraud." *Institut Attanwir Bojonegoro*, 2023.
- Simanjuntak, Dahnil Anzar, and Yeni Januarsi. "Akuntabilitas Dan Pengelolaan Keuangan Di Masjid." *Simposium Nasional Akuntansi XIV Aceh*, 2011.
- Subagya, Ratna Euis. "Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Masjid Berdasarkan Prinsip Akuntansi Syariah (Studi Masjid Baitul Mu'minin Kab. Lampung Tengah)," 2023.
- Suginam, S. "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat Berbasis Teknologi Informasi Pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)." *Journal of Economics and Accounting*, 2020.
- Sulistyawati. *Penelitian Kualitatif: Metode Penelitian Kualitatif*. *Jurnal ÉQUILIBRIUM*, 2023.
- Syaifuddin, Setiawan Muhammad. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi

- Kualitas Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba.” *Jurnal Akuntansi*, 2006.
- Untoro, Wisnu. *Kepublikan Sebagai Pemoderasi Pengaruh Perencanaan Strategik Pada Kinerja Organisasional*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2010.
- World Bank. *Governance and Development*. Washington DC: World Bank, n.d.
- Zubair, Muhammad Kamal. *Penulisan Karya Ilmiah Berbasis Tekhnologi Informasi*. Parepare: institut Agama Islam Negeri Parepare, 2020.







Kepada Yth.

Bapak/Ibu/Saudara (i)

Di Tempat

Assalamualaikum Wr.Wb.

Bapak/Ibu/Saudara/i dalam rangka menyelesaikan karya (Skripsi) pada Jurusan Akuntansi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Parepare maka saya,

Nama : Nurliah

NIM : 2120203862202046

Judul : Implementasi *Good governance* Dalam Pengelolaan Keuangan Masjid Ar - Rahman Lappa-Lappae Kecamatan Suppa

Untuk membantu kelancaran penelitian ini, Saya memohon dengan hormat kesediaan Bapak/Ibu/Saudara(i) untuk menjadi narasumber dalam penelitian kami.

Kami ucapan terima kasih,

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb

Hormat Saya,

NURLIAH

PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan Terkait Prinsip *Good governance* Yakni Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi Kepada Pengurus Masjid Ar Rahman Lappa-Lappae

1. Apakah bapak/ibu mengetahui tentang *Good governance*?
2. Menurut bapak/ibu apakah *Good governance* sudah diimplementasikan di Masjid Ar Rahman dan bagaimana penerapan *Good governance* di masjid Ar Rahman?
3. Siapa saja yang terlibat dalam pengelolaan keuangan masjid ini?
4. Apakah ada dokumentasi tertulis seperti laporan keuangan yang dapat diakses oleh pihak tertentu dan Bagaimana proses pencatatan dan pelaporan keuangan dilakukan?
5. Apakah pernah terjadi masalah dalam pengelolaan dana, dan bagaimana cara penyelesaiannya?
6. Apakah ada kendala dalam menyampaikan informasi keuangan kepada jamaah?
7. Apakah jamaah dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan keuangan masjid?
8. Apakah ada mekanisme khusus bagi jamaah untuk memberikan kritik, saran, atau masukan terkait pengelolaan keuangan?
9. Apa saja kendala yang dihadapi dalam menerapkan prinsip-prinsip tersebut?
10. Apakah ada rekomendasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan masjid?

Pertanyaan Terkait Prinsip *Good governance* Yakni Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi Kepada Jamaah Masjid Ar Rahman Lappa-Lappae

1. Apakah Anda mengetahui siapa yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan masjid?
2. Apakah Anda merasa bahwa pengelolaan dana masjid dilakukan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan jamaah?
3. Jika ada masalah dalam pengelolaan keuangan, apakah masjid memberikan penjelasan atau klarifikasi kepada jamaah?
4. Apakah laporan keuangan disampaikan secara jelas dan mudah dimengerti oleh jamaah dan Bagaimana informasi tentang penggunaan dana masjid biasanya disampaikan kepada jamaah (misalnya melalui papan pengumuman, rapat, atau lainnya)?
5. Apakah Anda pernah dilibatkan dalam kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan dana masjid, seperti rapat atau musyawarah dan Apakah jamaah diberikan kesempatan untuk memberikan masukan atau saran terkait penggunaan dana masjid?
6. Apakah Anda merasa masukan dari jamaah diperhatikan dan diterapkan dalam kebijakan masjid?
7. Menurut anda apa yang perlu dioptimalkan oleh pengurus masjid yang sangat penting untuk kepentingan jamaah dan keberlangungan di Masjid Ar-Rahman Lappa-Lappae?

Pinrang, 30 April 2025

Mengetahui,
Pembimbing

Indrayani, M.Ak

NIP 198812252019032009

HASIL WAWANCARA

Narasumber 1

Pak Suardi (Pengurus Masjid)

1. Apakah bapak/ibu mengetahui tentang *Good Governance*?

“Ya, saya tahu tentang Good Governance. Good Governance itu artinya tata kelola atau cara mengelola organisasi atau pemerintahan dengan baik. Di dalamnya ada prinsip-prinsip seperti keterbukaan, kejujuran, tanggung jawab, melibatkan masyarakat, adi intinya, supaya pengelolaan berjalan dengan baik”.

2. Menurut bapak/ibu apakah *Good Governance* sudah diimplementasikan di Masjid Ar Rahman dan bagaimana penerapan *Good Governance* di masjid Ar Rahman?

“Iya, Jadi begini dek kalau masalah transparansi di Masjid Ar-Rahman itu Transparan, setiap hari jumat diumumkan keadaan keuangan. Bawa saldo kas sekian, pemasukan sekian dan pengeluaran sekian. Kemudian kalau masalah sumbangan, sumbangan itu dari masyarakat artinya dari jamaah. Untuk akuntabilitas atau pertanggung jawabannya itu kita buat pencatatan terhadap setiap transaksi tetapi memang masih sederhana, belum sampai dibuat laporan keuangan yang lengkap dan rinci. Terkait masalah partisipasi, Jamaah biasanya diajak gotong royong kalau ada kegiatan, seperti bersih-bersih masjid atau acara tertentu. Kalau ada keperluan dana juga biasanya diumumkan, jadi jamaah bisa ikut membantu. Memang partisipasinya masih lebih banyak di kegiatan fisik atau sumbangan”.

3. Siapa saja yang terlibat dalam pengelolaan keuangan masjid ini?

“Kalau struktur organisasi di masjid itu cuman ada 3 yakni ketua panitia, sekertaris dan juga bendahara. Kalau ketuanya itu Pak subhan Majid, Sekertarisnya saya dan bendaharanya Hj Kartini. Kalau pengelolaan keuangan itu seluruh panitia terlibat. Jadi kalau misalnya kita mau membangun kita adakan rapat dengan jamaah. Nanti setelah kita adakan rapat dengan jamaah akan diputuskan disitu untuk membangun dan membeli keperluan masjid. Kalau rapat jamaah biasanya diumumkan saja kepada jamaah bahwa silahkanki tinggal akan ada rapat”.

4. Bagaimana bentuk penerapan Akuntabilitas (Pertanggungjawaban) dalam pengelolaan keuangan di Masjid ini?

“Kalau pertanggungjawaban secara ini, itu kan ada di umumkan setiap hari jumat, setiap hari jumat itu diumumkan saldo kas, baik ada pengeluaran maupun pemasukan. Kalau untuk pencatatan tidak dibuatkan laporan keuangan. Beda dengaan perusahaan bahwa perusahaan itu ada neracanya”.

5. Apakah ada dokumentasi tertulis seperti laporan keuangan yang dapat diakses oleh pihak tertentu dan Bagaimana proses pencatatan dan pelaporan keuangan dilakukan?
- “Kalau untuk laporan keuangan itu tidak ada, tetapi ang dibuat itu hanya transaksi terkait saldo kas yakni pemassukan dan pengeluaran saja, kan masjid itu untuk orang banyak berbeda dengan perusahaan”.*
6. Apakah pernah terjadi masalah dalam pengelolaan dana, dan bagaimana cara penyelesaiannya?
- “Selama ini, tidak pernah ada masalah dalam pengelolaan dana di Masjid Ar Rahman. Alhamdulillah semua berjalan lancar. Kalau ada hal-hal kecil atau perbedaan pendapat biasanya diselesaikan dengan musyawarah, tapi sejauh ini tidak pernah sampai jadi masalah besar. Jadi pengelolaan dananya aman-aman saja.”*
7. Apakah ada kendala dalam menyampaikan informasi keuangan kepada jamaah?
- “Sejauh tidak ada kendala yah, Pengurus selalu umumkan keuangan setiap Jumat, dan jamaah bisa langsung dengar. Jadi jamaah juga sudah terbiasa dan tidak merasa bingung atau kurang informasi.”*
8. Bagaimana bentuk penerapan prinsip partisipasi dalam pengelolaan keuangan Masjid Ar Rahman?
- “Dalam partisipasi itu, masyarakat dilibatkan dalam keuangannya, seperti jika ada hal yang ingin kita bangun atau ada hal yang ingin kita beli atau tanda kutip membutuhkan uang yang banyak itu kita rapatkan dulu hal-hal yang kita akan bangun”.*
9. Apakah jamaah dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan keuangan masjid?
- “Iya, jamaah dilibatkan dalam pengambilan keputusan soal pengelolaan keuangan masjid. Biasanya kalau ada rencana penggunaan dana, misalnya untuk renovasi atau kegiatan tertentu, pengurus akan menyampaikan ke jamaah, kadang lewat pengumuman atau musyawarah kecil. Jadi jamaah tetap diajak ikut berpendapat dan mendukung keputusan bersama.”*
10. Apakah ada mekanisme khusus bagi jamaah untuk memberikan kritik, saran, atau masukan terkait pengelolaan keuangan?
- “Sejauh ini belum ada mekanisme khusus. Jamaah yang mau memberi masukan biasanya langsung bicara ke pengurus dan untuk kritik, selama ini tidak ada kritikan dari masyarakat, karena memang sejak awal kita sudah sampaikan setiap minggunya terkait keadaan keuangan kalau ada pengeluaran, ada yang ingin dibeli dalam hal kapasitasnya seperti hal yang dibutuhkan di masjid itu dimusyawarakan”.*

11. Apa saja kendala yang dihadapi dalam menerapkan prinsip-prinsip tersebut?
“Alhamdulillah sampai sekarang tidak ada kendala yang serius dalam menerapkan prinsip-prinsip itu. Karena kami tiap minggu rutin kasih info, mulai dari kondisi kas sederhana sampai rencana beli kebutuhan masjid. jadi jamaah paham dan tidak ada masalah – masalah yang muncul”.
12. Apakah ada rekomendasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan masjid?
“Kalau masjid, masjid itu adalah miliknya masyarakat, tidak sama dengan organisasi-organisasi lain. kalau masjid itu tidak perlu ada seperti laporan laporan perusahaan. yang jelas, kita melaksanakan kegiatan-kegiatan di masjid, kita libatkan jamaah. Karena masjid itu tidak fleksibel tidak sama dengan organisasi-organisasi lainnya. Karena masjid itu dananya dari masyarakat dan kita sudah libatkan masyarakat dalam hal pengambilan keputusan untuk apa yang mau kita belanjakan, jadi tidak pernah ada kendala selama ini”.

Narasumber 1 (Masyarakat)

Afika Izati

1. Apakah anda mengetahui siapa yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan Masjid Ar Rahman?
“Ya, saya mengetahui yang menjadi bendahara ialah Ibu Hj.Kartini Sedangkan yang biasanya mengumumkan keuangan masjid adalah Pak lurah yakni Pak Supardi”.
2. Apakah anda merasa bahwa pengelolaan dana Masjid dilakukan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan jamaah?
“Iya, saya merasa pengelolaan dana Masjid Ar Rahman sudah cukup baik dan sesuai kebutuhan jamaah. Dana yang terkumpul biasanya diprioritaskan untuk hal-hal penting, seperti kebersihan, listrik, perawatan fasilitas, maupun perlengkapan ibadah. Kalau ada usulan baru dari jamaah, pengurus juga terbuka untuk musyawarah dan menyesuaikan anggaran. Jadi sejauh ini pengelolaan dananya terasa tepat dan sesuai harapan”.
3. Jika ada masalah dalam pengelolaan keuangannya, Apakah pengurus masjid memberikan penjelasan atau klarifikasi kepada jamaah?
“setahu saya kalau ada masalah dalam pengelolaan keuangan, pengurus masjid biasanya memberikan penjelasan atau klarifikasi kepada jamaah, Biasanya disampaikan melalui pengumuman setelah shalat berjamaah. Namun sejauh ini tidak ada masalah yang serius”.

4. Apakah laporan keuangan disampaikan secara jelas dan mudah dimengerti oleh jamaah dan Bagaimana informasi tentang penggunaan dana masjid biasanya disampaikan kepada jamaah (misalnya melalui papan pengumuman, rapat, atau lainnya)?

“Lumayan mudah dimengerti, kemudian umumnya informasi keuangan disampaikan pengurus pada hari jumat. Mereka selalu bilang sumber dana dan penggunaannya, namun untuk pencatatannya, setahu saya hanya dilakukan pencatatan sederhana seperti saldo masuk dan keluar saja, belum sampai pada tahapan laporan keuangan yang dijelaskan secara rinci. Kalau menurut saya sendiri pencatatan sederhana sudah cukup untuk kegiatan harian. Tetapi saya juga mendukung pembuatan laporan keuangan resmi, apalagi kalau masjid nanti mau skala kegiatan lebih besar. supaya akuntabilitasnya makin kuat dan bisa dipertanggungjawabkan secara tertulis.”

5. Apakah anda pernah dilibatkan dalam kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan dana masjid, seperti rapat atau musyawarah dan Apakah jamaah diberikan kesempatan untuk memberikan masukan atau saran terkait penggunaan dana masjid?

“terkait musyawarah semua orang dilibatkan, biasanya ketika akan ada rapat, diumumkan setelah shalat. jadi yang mau tinggal bisa tinggal dulu untuk mengikuti rapat, kemudian jamaah dipersilahkan untuk meberikan masukan terkait hal-hal yang dibutuhkan untuk keperluan masjid”.

6. Apakah anda merasa masukan dari jamaah diperhatikan dan diterapkan dalam kebijakan masjid?

“ Ya, masukan dari jamaah itu diterapkan. Pernah ada jamaah yang protes soal kipasnya yang rusak dan langsung diperbaiki”,

7. Menurut anda apa yang perlu dioptimalkan oleh pengurus masjid yang sangat penting untuk kepentingan jamaah dan keberlangsungan di Masjid Ar Rahman Lappa-Lappae?

“ Saya melihat yang paling perlu dioptimalkan adalah sistem pencatatan keuangan yang sekarang masih sederhana, agar dibuat lebih rapi dan sesuai dengan standar akuntansi masjid, sehingga kami bisa lebih mengetahui terkait perkembangan di masjid. Dan untuk masalah partisipasi. Sekarang ini remaja di masjid kurang diikutsertakan, ketika ada kegiatan terkadang hanya orangtua saja yang difokuskan sehingga kaum remaja kurang mengetahui terkait perkembangan di masjid”.

Narasumber 2

Pak Anto

1. Apakah anda mengetahui siapa yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan Masjid Ar Rahman?

“Iya, yang mengurus segala keperluan Masjid itu adalah Pak Lurah, istilahnya dia yang menjadi panitia pimpinan di Masjid. Tapi bukan dia yang menjadi bendahara melainkan Ibu Hj.Kartini, yang mengurus pengelolaan keuangan. Sedangkan yang biasanya mengumumkan dana Masjid itu pak lurah”.

2. Apakah anda merasa bahwa pengelolaan dana Masjid dilakukan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan jamaah?

“Ya, pengurus masjid bagus dalam mengelola keuangannya, dia cukup terbuka. Kan memang harusnya pengurus itu terbuka karena dana yang dikelola itu milik orang banyak bukan milik pribadi”.

3. Jika ada masalah dalam pengelolaan keuangannya, Apakah pengurus masjid memberikan penjelasan atau klarifikasi kepada jamaah?

“kalau untuk penjelasan apabila ada salah jumlah di notanya yang tidak sesuai tidak ada penjelasan tapi yang disebut itu harga aslinya yang ada di nota”.

4. Apakah laporan keuangan disampaikan secara jelas dan mudah dimengerti oleh jamaah dan Bagaimana informasi tentang penggunaan dana masjid biasanya disampaikan kepada jamaah (misalnya melalui papan pengumuman, rapat, atau lainnya)?

“Laporan keuangan masjid sudah disampaikan kepada jamaah, Biasanya disampaikan pada hari jumat.

5. Apakah anda pernah dilibatkan dalam kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan dana masjid, seperti rapat atau musyawarah dan Apakah jamaah diberikan kesempatan untuk memberikan masukan atau saran terkait penggunaan dana masjid?

“ Ya biasanya kalau sementara sudah sholat biasa disampaikan kalau ada rencana yang mau dilakukan, kita dimintai pendapat apa bagus atau tidak kalau dibuat. Pernah ada rencana membuat kanopi yang di depan masjid kita dimintai pendapat apakah setuju semua kalau dibuatkan, diberitahukan juga bahwa sekian dananya yang diperlukan”.

6. Apakah anda merasa masukan dari jamaah diperhatikan dan diterapkan dalam kebijakan masjid?

“ Kalau menurut saya masukan dari jamaah itu selalu didengar, kan memang itu gunanya kita dimintai pendapat”.

7. Menurut anda apa yang perlu dioptimalkan oleh pengurus masjid yang sangat penting untuk kepentingan jamaah dan keberlangsungan di Masjid Ar Rahman Lappa-Lappa?

“ Kalau saya yang perlu dioptimalkan itu transparansinya, kan sudah ada papannya toh, sisa dicatat semua pengeluaran dan pemasukan di masjid di papan itu, supaya semua jamaah bisa tahu keuangan di Masjid”.

Narasumber 3

Ibu Uni

1. Apakah anda mengetahui siapa yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan Masjid Ar Rahman?
“ Yang menjadi bendahara masjid itu Ibu Hj.Kartini”.
2. Apakah anda merasa bahwa pengelolaan dana Masjid dilakukan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan jamaah?
“ Saya rasa bahwa pengelolaan keuangan di masjid Ar rahman ini sudah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan jamaah. Dana yang ada sudah digunakan untuk keperluan di Masjid”.
3. Jika ada masalah dalam pengelolaan keuangannya, Apakah pengurus masjid memberikan penjelasan atau klarifikasi kepada jamaah?
“ Ya, biasanya jika ada masalah misalnya uang hilang atau uang kurang. Biasanya diumumkan di masjid, bahkan kadang pembahasan uang hilang itu langsung dari speaker masjid, yang berisi pembicaraan hasil rapatnya”.
4. Apakah laporan keuangan disampaikan secara jelas dan mudah dimengerti oleh jamaah dan Bagaimana informasi tentang penggunaan dana masjid biasanya disampaikan kepada jamaah (misalnya melalui papan pengumuman, rapat, atau lainnya)?
“ Jelas, dananya itu biasanya disebut saja bahwa sekian jumlahnya biasanya diumumkan pada hari jumat. Disana ada papannya tapi tidak pernah tertulis”.
5. Apakah anda pernah dilibatkan dalam kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan dana masjid, seperti rapat atau musyawarah dan Apakah jamaah diberikan kesempatan untuk memberikan masukan atau saran terkait penggunaan dana masjid?

"Kalau masalah dilibatkan, semua jamaah bebas untuk mengikuti rapatnya, sebelum atau sesudah sholat disampaikan kepada jamaah untuk tinggal sebentar mengikuti rapat. Kemudian bebas memberikan pendapatnya".

6. Apakah anda merasa masukan dari jamaah diperhatikan dan diterapkan dalam kebijakan masjid?

"Iya, saya merasa masukan dari jamaah cukup diperhatikan. Biasanya kalau ada usulan atau saran dari jamaah, pengurus masjid akan mendengarkan dulu, terus dibahas dalam rapat. Memang tidak semua saran langsung diterima, tapi kalau dirasa baik dan bermanfaat untuk semua, biasanya akan dijalankan. Jadi kita merasa pendapat kita ada gunanya.".

7. Menurut anda apa yang perlu dioptimalkan oleh pengurus masjid yang sangat penting untuk kepentingan jamaah dan keberlangsungan di Masjid Ar Rahman Lappa-Lappae?

"Yang paling penting menurut saya itu komunikasi sama jamaah. Supaya pengurus tahu apa yang dibutuhkan jamaah, dan jamaah juga tahu apa saja program masjid. Jadi masjid bisa lebih hidup dan rame kegiatannya."

Narasumber 4

Ibu Hj.Kartini

1. Apakah anda mengetahui siapa yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan Masjid Ar Rahman?

" Yang menjadi bendahara masjid itu saya sendiri, tetapi yang mengelola keuangan ialah Pak Suardi, saya hanya memegang uang saja ".

2. Apakah anda merasa bahwa pengelolaan dana Masjid dilakukan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan jamaah?

"Iya, menurut saya pengelolaan dana masjid sudah dilakukan dengan baik dan sesuai kebutuhan jamaah. Setiap dana yang masuk digunakan sebaik mungkin, seperti untuk keperluan kebersihan masjid, perbaikan fasilitas, kegiatan keagamaan, dan membantu jamaah yang membutuhkan. Jadi insyaAllah dananya tidak disalahgunakan dan benar-benar dipakai untuk kepentingan bersama."

3. Jika ada masalah dalam pengelolaan keuangannya, Apakah pengurus masjid memberikan penjelasan atau klarifikasi kepada jamaah?

"Iya, kalau ada masalah dalam pengelolaan keuangan, biasanya pengurus masjid akan memberikan penjelasan atau klarifikasi ke jamaah. Misalnya lewat pengumuman setelah salat Jumat atau rapat kecil bersama pengurus dan tokoh masyarakat. Jadi semuanya dibicarakan secara terbuka supaya tidak ada salah paham."

4. Apakah laporan keuangan disampaikan secara jelas dan mudah dimengerti oleh jamaah dan Bagaimana informasi tentang penggunaan dana masjid biasanya disampaikan kepada jamaah (misalnya melalui papan pengumuman, rapat, atau lainnya)?

"Iya, laporan keuangan disampaikan dengan cara yang gampang dimengerti, biasanya disampaikan waktu rapat sama jamaah."

5. Apakah anda pernah dilibatkan dalam kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan dana masjid, seperti rapat atau musyawarah dan Apakah jamaah diberikan kesempatan untuk memberikan masukan atau saran terkait penggunaan dana masjid?

"Iya, saya sendiri memang dilibatkan karena saya sebagai bendahara, jadi otomatis ikut dalam rapat atau musyawarah yang membahas soal keuangan masjid. Di situ biasanya kami bahas dana yang masuk, pengeluaran, dan rencana ke depan. Jamaah juga dikasih kesempatan untuk kasih masukan, apalagi kalau ada hal-hal penting yang perlu dibicarakan bareng. Bisa lewat rapat, atau langsung datang ke pengurus juga bisa."

6. Apakah anda merasa masukan dari jamaah diperhatikan dan diterapkan dalam kebijakan masjid?

"Iya, menurut saya masukan dari jamaah cukup diperhatikan. Kalau ada saran dari jamaah, biasanya dibahas dulu sama pengurus, terus kalau memang baik dan sesuai kebutuhan masjid, ya langsung diterapkan. Kami juga terbuka kok, jadi kalau ada yang mau kasih saran, insyaAllah pasti didengar."

7. Menurut anda apa yang perlu dioptimalkan oleh pengurus masjid yang sangat penting untuk kepentingan jamaah dan keberlangsungan di Masjid Ar Rahman Lappa-Lappae?

"Yang penting itu transparansi keuangan dan penguatan kegiatan keagamaan, supaya jamaah makin percaya dan masjid tetap ramai."



DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
NOMOR : B-2466/ln.39/FEBI.04/PP.00.9/06/2024

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI/TUGAS AKHIR MAHASISWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAEREPARE

- Menimbang a. Bahwa untuk menjamin kualitas skripsi/tugas akhir mahasiswa FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN Parepare, maka dipandang perlu penetapan pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa tahun 2024
- b. Bahwa yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diserahkan tugas sebagai pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa.
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah RI Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Parepare;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor: 394 Tahun 2003 tentang Pembukaan Program Studi;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Parepare
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- Memperhatikan : a. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP DIPA-025.04.2..307381/2024, tanggal 24 November 2023 tentang DIPA IAIN Parepare Tahun Anggaran 2024
- b. Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor: 361 Tahun 2024 Tahun 2024, tanggal 21 Februari 2024 tentang pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam;
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan : a. Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tentang pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare Tahun 2024
- b. Menunjuk saudara: **Indrayani, M.Ak**, sebagai pembimbing skripsi/tugas akhir bagi mahasiswa :
- Nama Mahasiswa : **NURLIAH**
- NIM : **2120203862202046**
- Program Studi : **Akuntansi Syar'ah**
- Judul Penelitian : **ANALISIS PENGELOLAAN BUDIDAYA RUMPUT LAUT :REFLEKSI PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT PESISIR DI DESA KARABALLO KECAMATAN SUPPA**
- c. Tugas pembimbing adalah membimbing dan mengarahkan mahasiswa mulai pada penyusunan sinopsis sampai selesai sebuah karya ilmiah yang berkualitas dalam bentuk skripsi/tugas akhir;
- d. Segala biaya akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran belanja IAIN Parepare;
- e. Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Parepare
Pada tanggal 10 Juni 2024

Dekan,



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP 197102082001122002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

 Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 (0421) 21307 (0421) 24404
 PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

28 April 2025

Nomor : B-1399/ln.39/FEBI.04/PP.00.9/04/2025
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG
 Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 di
 KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	:	NURLIAH
Tempat/Tgl. Lahir	:	MAJAKKA, 26 Januari 2004
NIM	:	2120203862202046
Fakultas / Program Studi	:	Ekonomi dan Bisnis Islam / Akuntansi Syari`ah
Semester	:	VIII (Delapan)
Alamat	:	KARABALLO, KELURAHAN WATANG SUPPA, KECAMATAN SUPPA, KABUPATEN PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah BUPATI PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN MASJID AR RAHMAN LAPPA LAPPAE KECAMATAN SUPPA

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 29 April 2025 sampai dengan tanggal 10 Juni 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,

 Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
 NIP 197102082001122002

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**
 Nomor : 503/0218/PENELITIAN/DPMPTSP/05/2025

Tentang

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 08-05-2025 atas nama NURLIAH, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian.

Mengingat :

- Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
- Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
- Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
- Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
- Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
- Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 terkait Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
- Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
- Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.

Memperhatikan :

- Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0338/R/T.Teknis/DPMPTSP/05/2025, Tanggal : 08-05-2025
- Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0219/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/05/2025, Tanggal : 08-05-2025

M E M U T U S K A N

Menetapkan **KESATU** : Memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :

1. Nama Lembaga	:	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
2. Alamat Lembaga	:	JL. AMAL BAKTI NO. 8 SOREANG PAREPARE
3. Nama Peneliti	:	NURLIAH
4. Judul Penelitian	:	IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN MASJID AR RAHMAN LAPPA-LAPPAE KECAMATAN SUPPA
5. Jangka waktu Penelitian	:	2 Bulan
6. Sasaran/target Penelitian	:	PENGURUS MASJID DAN JAMAAH MASJID AR RAHMAN LAPPA-LAPPAE KECAMATAN SUPPA
7. Lokasi Penelitian	:	Kecamatan Suppa

KEDUA : Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 08-11-2025.

KETIGA : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Surat Keterangan Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 08 Mei 2025

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP.,M.Si
 NIP. 197406031993112001
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang



Biaya : Rp 0,-




**Balai
Sertifikasi
Elektronik**


**CERTIFIED
QUALITY
MANAGEMENT
SYSTEM**
URS
 UNITED CERTIFICATION SYSTEM


**ZONA
HIJAU**


**OMBUDSMAN
REPUBLIK INDONESIA**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSePA
 DPMPTSP

CS Dipindai dengan CamScanner



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN SUPPA
KELURAHAN TELLUMPANUA
 Jl. Pramuka No. Lappa-lappae Kode Pos 91272

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor : SKTMP/217/TP/V/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kelurahan Tellumpanua, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang menerangkan bahwa :

Nama	:	NURLIAH
Alamat	:	Majakka
Pekerjaan/Lembaga	:	Mahasiswa(i)
Jurusan/Prodi	:	Akuntansi Syari'ah
Fakultas	:	Ekonomi dan Bisnis Islam
Alamat Kampus	:	Jl. Amal Bakti No.08 Soreang Parepare

Benar yang tersebut namanya diatas telah melaksanakan penelitian di Wilayah Kelurahan Tellumpanua, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang dalam rangka penyusunan skripsi pada tanggal 29 April s/d 09 Mei 2025 dengan judul "**Implementasi Good Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Masjid Ar Rahman Lappa-lappae Kecamatan Suppa**".

Demikian Surat Keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lappa-lappae, 21 Mei 2025



IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Suardi Suaib, SE
Alamat : Lappa-Lappa
Jenis Kelamin : Laki Laki
Pekerjaan : Lurah sekaligus sekertaris Masjid Ar-Rahman
Umur : 45

Menerangkan bahwa,

Nama : Nurliah
Nim : 2120203862202046
Program Studi : Akuntansi Syariah

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Implementasi *Good governance* Dalam Pengelolaan Keuangan Masjid Ar - Rahman Lappa-Lappa Kecamatan Suppa."

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Pinrang, 2 Mei 2025

Yang bersangkutan

(Suardi Suaib, SE)

CS Disediakan dengan Cetakan Komputer

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	Hj. Kartini
Alamat	:	Lappa-Lappae
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Pekerjaan	:	Bendahara Masjid
Umur	:	40

Menerangkan bahwa,

Nama	:	Nurliah
Nim	:	2120203862202046
Program Studi	:	Akuntansi Syariah

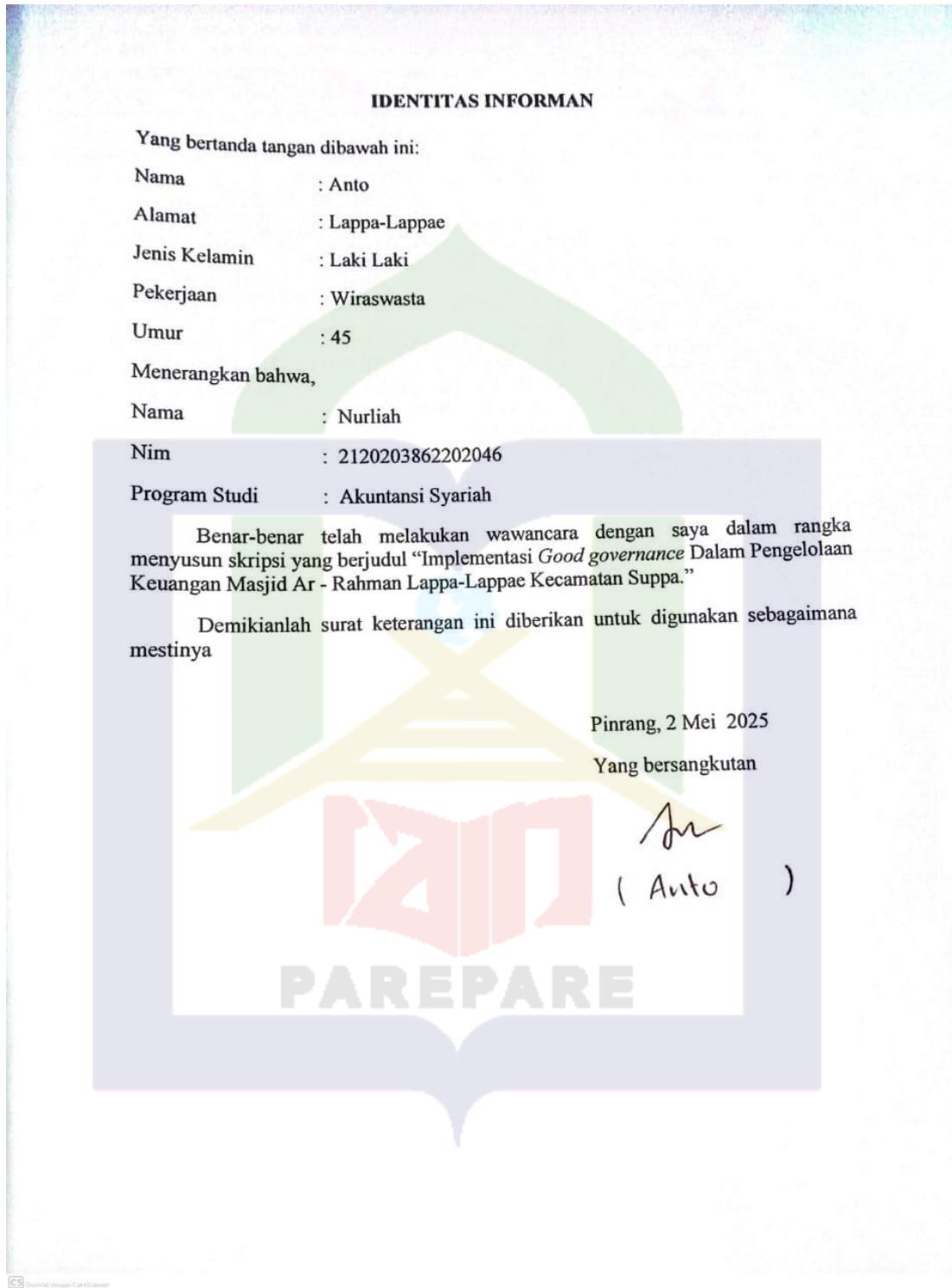
Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Implementasi *Good governance* Dalam Pengelolaan Keuangan Masjid Ar - Rahman Lappa-Lappae Kecamatan Suppa."

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Pinrang, 2 Mei 2025

Yang bersangkutan


 (Hj. KARTINI)



IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Uni
Alamat : Lappa-Lappae
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : IRT
Umur : 25

Menerangkan bahwa,

Nama : Nurliah
Nim : 2120203862202046
Program Studi : Akuntansi Syariah

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Implementasi *Good governance* Dalam Pengelolaan Keuangan Masjid Ar - Rahman Lappa-Lappae Kecamatan Suppa."

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Pinrang, 2 Mei 2025

Yang bersangkutan


(uni)



State Islamic Institute
PAREPARE

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	Afika Izati
Alamat	:	Lappa-Lappae
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Pekerjaan	:	Mahasiswi
Umur	:	21

Menerangkan bahwa,

Nama	:	Nurliah
Nim	:	2120203862202046
Program Studi	:	Akuntansi Syariah

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul “Implementasi *Good governance* Dalam Pengelolaan Keuangan Masjid Ar - Rahman Lappa-Lappae Kecamatan Suppa.”

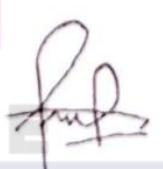
Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Pinrang, 2 Mei 2025

Yang bersangkutan



PAREPARE



(AFIKA IZATI)



Wawancara dengan Pengurus Masjid



wawancara dengan Ibu Hj. Kartini



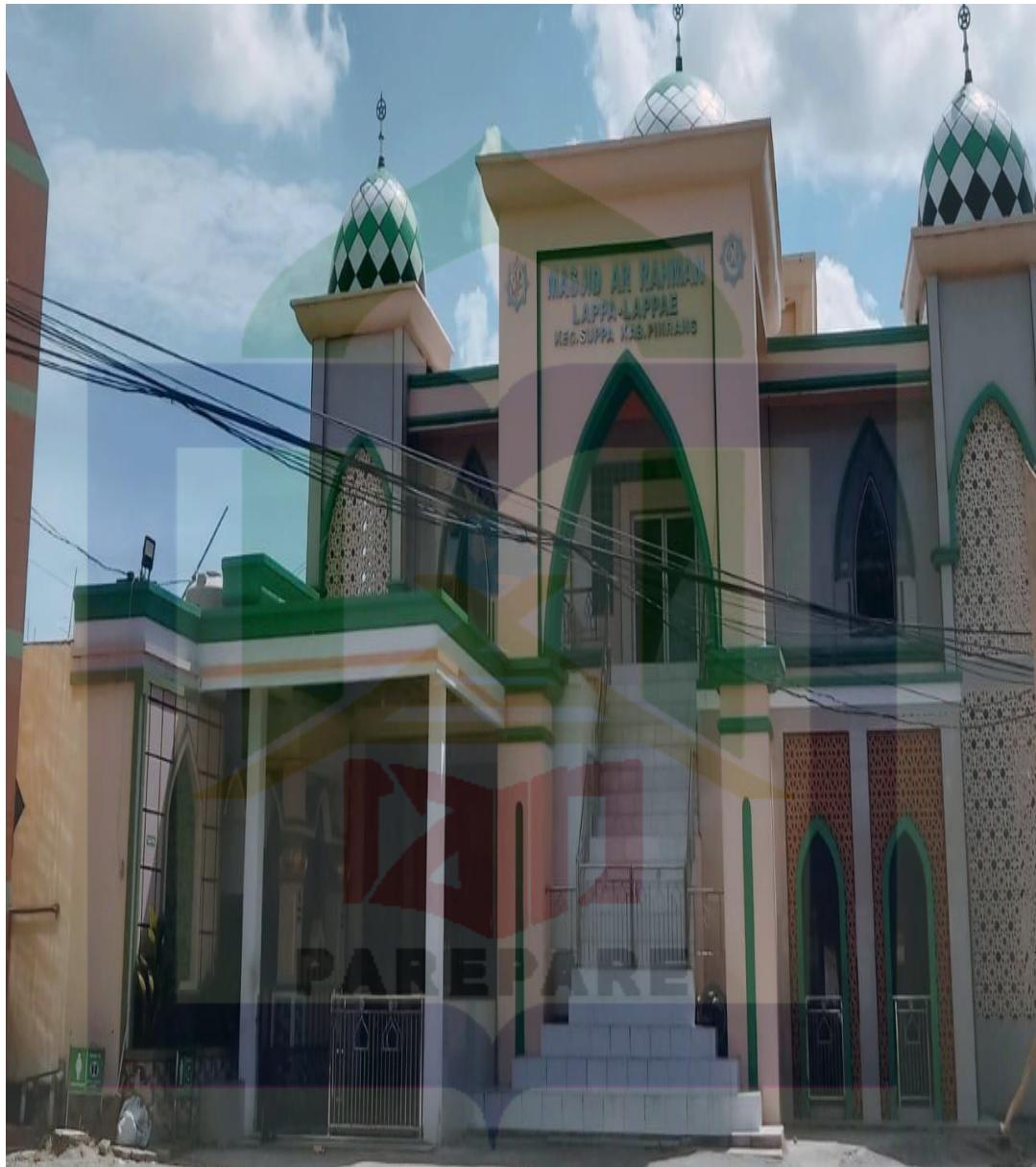
Wawancara dengan Pak Anto



Wawancara dengan Ibu Uni



Wawancara dengan saudari Afika Izati



Masjid Ar-Rahman Lappa-Lappae

BIODATA PENULIS



Nurliah, lahir di Majakka, pada tanggal 26 januari 2004. Merupakan anak bungsu dari 3 bersaudara yang lahir dari pasangan bapak Palman dan Ibu Wali. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Penulis memulai pendidikan dasar di SD Negeri 105 Majakka pada tahun 2009-2015, kemudian melanjutkan pendidikan di tingkat menengah pertama di SMP Negeri 1 Suppa pada tahun 2015-2018, kemudian melanjutkan pendidikan di sekolah kejuruan dengan jurusan

Akuntansi dan Lembaga Keuangan di SMK Negeri 3 Pinrang pada taahun 2018-2021. Di taahun yang sama, penulis melanjutkan studi ke jenjang S1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dan memilih program studi Akuntansi Syariah. Penulis melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan di Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Parepare pada tahun 2024, kemudian melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Desa Beroangin, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali mandar pada tahun 2024 dan menyelesaikan tugas akhirnya yang berjudul “ Implementasi *Good Governance* Dalam Pengelolaan Keuangan Masjid Ar-Rahman Lappa-Lappae Kecamatan Suppa”.